



DINAS KOMINFO

MENUJU GERBANG DUNIA PEMERINTAHAN TERBUKA RAKYAT BAHAGIA





DINAS KOMINFO

MENUJU GERBANG DUNIA PEMERINTAHAN TERBUKA RAKYAT BAHAGIA



Bojonegoro, **Open Government Partnership**

“..... pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

(pembukaan UUD 1945 alinea IV)

Cita-cita bangsa Indonesia dalam membentuk negara Republik Indonesia terhadap rakyatnya termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara



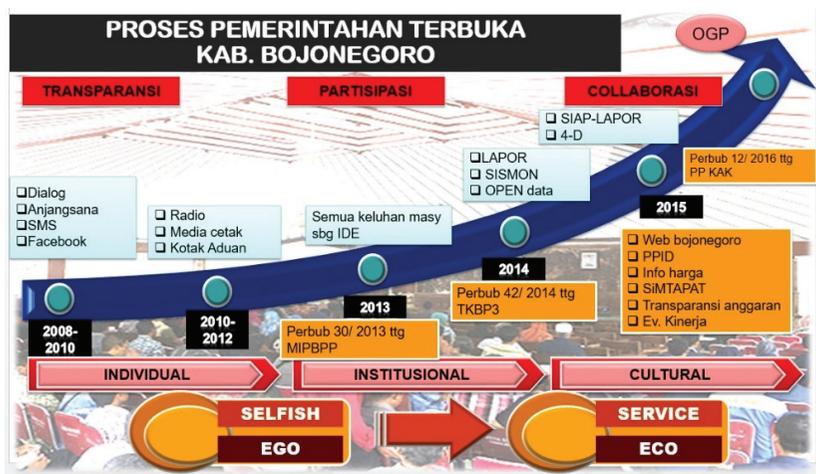
Oleh: Kusnandaka Tjatur
Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro

dan prosesnya? Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Kang Yoto-Kang Hartono, telah melakukan cara dan proses tersebut. Mengimplementasikan “Pemerintahan Terbuka”, adalah salah satunya.

Proses panjang telah dilalui, untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, secara tepat, cepat dan bermanfaat. Hal yang paling sederhana dalam proses keterbukaan telah dilakukan di tahun 2008 dengan “Dialog Publik”, membuka akses informasi yang bisa menyampaikan uneg-unegnya langsung kepada Bupati, Wakil Bupati dan para pimpinan. Anjangsana atau blusukan, merupakan bagian cara mendengarkan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, merupakan bagian untuk menguatkan akses informasi, memahami dan memberikan solusi berbagai persoalan di masyarakat.

Pemerintahan terbuka, tidaklah hanya menjadi kewajiban pemerintah semata, bukan hanya sebagai hak warga negara, tidak hanya transparansi dan partisipasi, tetapi sinergitas dan collaboration para pihak, adalah kuncinya. Kolaborasi 4 (empat) sekawan telah dilakukan Bojonegoro. Keterlibatan dan melibatkan Akademisi, Bussines, Government dan Community (ABGC), dalam perumusan berbagai kebijakan.

Terbangunnya keeratan dan kekuatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat dalam berbagai elemen, merupakan



pengikatnya. Saling percaya tidak hanya secara individual, harus terdorong sebagai institusional dan terimplementasikan sebagai cultural. Dalam pola layanan, tidak hanya sekedar berpikir untuk dirinya sendiri (ego), harus berubah untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan umum (eco), tidak hanya sekedar serfish, tetapi harus memberikan layanan yang terumuskan berdasarkan maklumat para pihak utamanya yang terlayani (service).

Open Government Partnership (OGP) adalah salah satu

Fwd: Undangan Menghadiri Diskusi Peer Review Open Government Indonesia

Fithya Findie <fithya.findie@gmail.com>
ke kangsyuto, saya, aansivi

Kepada Yth,
Bapak Bupati Bojonegoro
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, PemKab Bojonegoro
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, PemKab Bojonegoro
di tempat,

Terlampir kami teruskan surat dari Direktur Aparatur Negara, Ibu Raden Siliwanti terkait Diskusi Open Government Review Indonesia hari Kamis, 8 Oktober 2015 di Hotel Pullman, Jakarta.

Jadwal keseluruhan rangkaian acara masih menunggu final approval dari OECD, paling lambat besok sudah bisa saya teruskan. Namun demikian acara dengan perwakilan Pemerintah Daerah sudah confirmed akan diadakan di hari Kamis, 8 Oktober, 9:30-11:30 WIB.

Jika ada pertanyaan, saya bisa dihubungi di 08111779676 atau 021-3148561.

Salam dan terima kasih,
Findie

3 Lampiran



kang syuto <kangsyuto@gmail.com>

Tanggal: 27 Okt 2015 20:27
 Subject: OECD Open Government Review of Indonesia - Bojonegoro Regency Practices
 Kepada: "kangsyuto" <kangsyuto@gmail.com>
 Di: "mailto:fithya.findie@gmail.com"

Dear Kurnandita,

This is Rodrigo Nájia's Report from the OECD's digital government team. We met briefly earlier this month at the Pullman Hotel as part of the OECD's fact-finding mission for the Open Government Review of Indonesia. I would like to thank you for sharing the Bojonegoro's experience in the use of digital technologies to find innovative solutions to existing problems. It provided us with a very clear and comprehensive view of the efforts made by the Bojonegoro Regency to support the creation of a more open, participatory, innovative, effective and efficient local government.

We were all very keen on hearing about your initiatives and would like to learn more about them. More specifically, we would like to ask that you provide us with more information on your different initiatives using when applicable the Good Practice Submission Form attached. Please include:

- The Regency's open data programme, including: background information, budget, number of employees working in the programme, number of open datasets, procedure for releasing data on the portal, existing quality control mechanisms, performance indicators used (please, provide data for the past 5 years if available), integration with other existing open-data portals in the public sector (e.g. National Open Data portal).
- Initiatives to foster the re-use of data and interest in open data (e.g. hackathons, visualization) design, implementation challenges and successes and evaluation. We invite you to the above mentioned form.
- The public dialogue forum. Please use the good practice submission form attached.

Please feel free to include any other initiative not included in this list that you may feel is relevant to the use of ICT to foster open, transparent and participatory governments that deliver high quality and efficient public services. Please, send these back to us by **Friday 23 November at the latest**.

I would also like to take the opportunity to thank you for your cooperation and continued support. As an essential source of input, your collaboration will be key to enable us to deliver a report that meets your expectations.

I remain at your disposal if you have any questions or doubts.

Best regards,
 Rodrigo

OECD
 Rodrigo Nájia Riart
 Junior Consultant
 Pattern of the Public Sector Division
 Public Governance and Territorial Development Directorate

2, rue André Pascal - 75775 Paris Cedex 16
 Tel: +33 (0) 1 45 24 14 18
 www.oecd.org
 www.oecd.org/oepr

OECD Public Governance Ministerial Meeting
 Results, Paris, 18 October 2015

PUBLIC GOVERNANCE
 AND TERRITORIAL
 DEVELOPMENT

lembaga dunia, secara resmi diluncurkan pada tanggal 20 September 2011, di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB oleh 8 Kepala Negara pemerintah pendiri, yaitu Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris Raya, dan Amerika Serikat, yang didukung Open Deklarasi Pemerintah

Kitty von Bertele<kitty.vonbertele@opengovpartnership.org> 8 Apr 2016

ke saya, Fithya, Endang, Sulastio, Nyoman

Dear Kusnandaka Tjatur P.,

A couple of weeks ago members of the OGP Steering Committee met to assess the 45 applications we received for the subnational government pilot program. I am really pleased to let you know that Bojonegoro Regency was chosen as one of 15 subnational governments to be part of the pilot and work with OGP to develop specific commitments, in partnership with civil society. The whole Steering Committee has now approved the selection of the pilot governments and were really impressed with the strength of your application.

Of course, now the work to develop specific commitments begins. I would like to arrange a time to speak over the next couple of weeks so that we can talk about what you need to do, how to start the process and what the timeline should be. I am in San Francisco, on Pacific time but am able to speak in my afternoon/evening, which would be your morning the next day - I'd be grateful if you could suggest a few times that would be convenient for you and I will try to accommodate.

OGP will be announcing the pilot participants early next week, in our monthly newsletter. I also think it would be great if you could promote this locally, to start to develop the kind of energy that will be crucial for a successful OGP process. I am attaching a template press release. You are of course free to develop your own, to use or change any of this and I understand you'll need to translate as appropriate - I really just want it to serve as a guide for the type of announcement you could make.

We will be hosting a webinar next Thursday 14 April at 11am ET, in partnership with the World Bank, when a couple of members of our Steering Committee will be talking a bit about the pilot and you will have the opportunity to ask questions and join the discussion. It would be great if you're able to join that - you can see more details and a link to register for it [here](#).

I would like to publish the application letters from successful governments, alongside the announcement. Please let me know if you have any problem with that.

Congratulations for this - I'm really thrilled that you will be part of OGP and excited to begin working with you. I look forward to speaking soon.

Very best regards,

Kitty von Bertele+1 415 910 9187 | +1 415 561 7810

Open Government Partnership Support Unit

dan masyarakat sipil masing-masing negara. Delapan anggota pendiri juga menyambut komitmen 38 pemerintah untuk bergabung pada lembaga OGP. Saat sekarang, pada pertemuan para pemimpin negara OGP 7-9 Desember 2016 di Paris, anggotanya menjadi 75 negara.

Praktek keterbukaan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah menarik perhatian Organisation for Economic Cooperation

of Development (OECD) yang sedang menyusun dampak pelaksanaan open government, baik di pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas RI. Kabupaten Bojonegoro diundang untuk mengikuti pertemuan bersama beberapa pemerintah daerah lainnya.

Pada tanggal 27 Oktober 2015 mendapatkan email dari Rodrigo Mejia Ricart Junior Consultant Reform of Public Sektor Division Public Governance and Territorial Development Directorate OECD, tentang quesioner praktek-praktek pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro.

Tim Kementerian PPN/ Bappenas Sekretaris Nasional Open Government Indonesia (OGI) tanggal 3-4 Desember 2015, mengadakan penjangaran. Dilanjutkan audiensi dengan Bapak Bupati pada tanggal 25-29 Januari 2016. Proses selanjutnya, Bupati Bojonegoro mengirimkan kesanggupan kepesertaan

Pemerintahan daerah (subnational) yang terseleksi menjadi pioner adalah sebagai berikut :

Asia :

1. Bojonegoro, Indonesia
2. Seoul, Korea Selatan
3. Tbilisi, Georgia

Eropa :

4. Paris, Perancis
5. Madrid, Spanyol
6. Scotland, United Kingdom

Amerika :

7. Buenos Aires, Argentina
8. Ontario, Canada
9. Austin, Amerika Serikat
10. La Libertad, Peru
11. Jalisco, Mexico
12. Sao Paulo, Brasil

Afrika :

13. Kigoma Ujiji, Tanzania
14. Sekondi-Takoradi, Ghana
15. Elgeyo Markwet, Kenya





sebagai pemerintahan terbuka tahun 2016 dengan surat Bupati Bojonegoro tanggal 24 Februari 2016 nomor : 489/ 0109/ 412.45/ 2016, yang memperkuat dua NGO, BI dan IDFoS.

Setelah melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh lembaga OGP, berdasarkan email dari Kitty Tim OGP tanggal 8 April 2016, menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai salah satu *pilot project* keterbukaan pemerintahan terbuka dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.

Terpilihnya Bojonegoro sebagai pemerintahan daerah terbuka percontohan dunia, menjadikan Bojonegoro diundang di berbagai forum tingkat internasional, sekaligus Kang Yoto menjadi *keynote speaker*. Antara lain terundang pada kegiatan :

1. Open Government Partnership Asia Pasific Regional Dialogue, tanggal 21-22 Juli 2016 di Manila
2. Subnational Pioneers'tier Meeting, tanggal 15-16 September 2016 di Washington DC
3. Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, Brighton-UK tanggal 5 Desember 2016
4. Open Government Partnership Global Summit, tanggal 7-9 Desember di Paris.

Rencana Aksi OGP

Rencana aksi tahun 2016-2017 OGP Kabupaten Bojonegoro sebagai *subnational pioneers*, sebagai berikut :

1. Revolusi Data
2. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah Desa
3. Peningkatan Transparansi sistem Anggaran Daerah
4. Penguatan Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik



Daftar Isi

Membuka Ruang Dialog dengan Rakyat	1
Sejarah Masa Lalu, Sejarah Kemiskinan	3
Sejarah Kemiskinan dan Sustainable Development Bojonegoro	5
Bojonegoro Masa Kini	9
<hr/>	
Pintu-Pintu Keterbukaan	
A. Dialog Jumat	13
B. SMS ke Radio	28
C. Blusukan	30
D. Laporan	32
<hr/>	
Implementasi Pemerintah Bojonegoro Menuju Keterbukaan	36
A. Dampak Dialog Jumat dan Demokrasi Kecil Bojonegoro	37
B. Dampak Blusukan dan Ekonomi Kerakyatan	41
C. Penegakan HAM, Pemerintah Terbuka	47
D. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs ala Bojonegoro	57
<hr/>	
Learning Journey	
Spirit The Origin Of Java The Real Indonesia Bojonegoro dalam OGP	69
Pemerintah Terbuka, Rakyat Bahagia	72
Co-Creating, Keharusan Dalam Open Government	76
Penutup	81
<hr/>	
Lampiran	83 -96

PEMBUKA

Membuka Ruang Dialog dengan Rakyat



Suatu ketika seorang pejabat kepala SKPD di Bojonegoro bercerita. Ketika awal pada 2008 dialog Jumat dibuka, semua pejabat merasa ketakutan menghadiri dialog tiap usai salat Jumat di pendapa. Mereka belum siap menjawab pertanyaan, keluhan dan cacian dari rakyat. Mereka menganggap semua data yang dimiliki oleh SKPD tidak boleh dibuka kepada publik. Bagi SKPD saat itu, data adalah rahasia negara yang tak boleh dibuka kepada rakyat.

Bahkan, lanjut dia bercerita, sejumlah kepala SKPD terpaksa ke orang 'pintar'. Tujuannya agar terhindar dari pertanyaan-pertanyaan kritis kepada mereka.

Namun, lambat laun, para kepala SKPD dan pejabat lainnya akhirnya menyadari bahwa dialog Jumat menjadi sangat penting. Sebab era sudah berubah. Masyarakat juga makin cerdas. Dalam penyelenggaraan pemerintah yang paling penting adalah jujur dan terbuka kepada rakyat.

Dialog Jumat memberi banyak manfaat kepada Bojonegoro. Pejabat bukan hanya merasa diawasi kinerjanya oleh masyarakat. Jauh lebih penting adalah pemerintah terbuka terhadap semua proses pembangunan di Bojonegoro. Siapa saja yang ingin mempertanyakan, menggugat kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui Dialog Jumat.

Begitu juga dengan SKPD, harus siap mental menjawab dan membuka data-data yang dimiliki kepada rakyat.

Dialog Jumat telah berlangsung selama 8 tahun. Keterbukaanlah yang membuat Bojonegoro menjadi kabupaten yang awalnya termiskin di Jawa Timur, kini menjadi kabupaten yang pertumbuhan ekonominya paling pesat tingkat Jawa Timur. Bahkan di tingkat nasional.

Era kepemimpinan Kang Yoto menjadi penanda awal keterbukaan di Bojonegoro. Kang Yoto telah mendobrak

pintu yang selama ini tertutup rapat bagi rakyat. Keterbukaan pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan keterbukaan tak ada lagi sekat yang sakral antara pejabat dan rakyat. Karena sesungguhnya keterbukaan akan mendorong kesejahteraan bagi rakyat.

Berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya yang tertutup. Era Kang Yoto membuka semua pintu untuk berdialog dengan rakyat.

Awal kepemimpinan Kang Yoto ditandai mendobrak desakralisasi pendapa. Rakyat diundang makan bersama dengan menu ala rakyat jelata. Ribuan rakyat menikmati sajian makan bersama di pendapa saat awal syukuran Kang Yoto terpilih sebagai bupati-wakil bupati pada 2008. Rakyat benar-benar menikmati pendapa adalah benar-benar rumah rakyat.

Sebelumnya, pendapa sangat sakral. Hanya pejabat dan undangan tertentu saja yang boleh menginjakkan kaki di pendapa. Bagi masyarakat awam, pendapa adalah simbol kekuasaan. Masuk ke pendapa harus melewati penjaga. Jika tak ada keperluan yang penting, jangan berharap akan bisa masuk kompleks kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

Ketika awal Kang Yoto menjabat, maka sakralisasi pendapa itu mulai pelan-pelan runtuh, pendapa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Selama kosong dan dapat digunakan, maka pendapa menjadi tempat aktivitas masyarakat. Mulai kegiatan pendidikan, sosial dan budaya.

Setelah desakralisasi pendapa, Kang Yoto membuka ruang dialog terbuka dengan rakyat dalam Dialog Jumat. .

Rakyat boleh menanyakan apapun kepada pejabat. Rakyat boleh protes. Bahkan ada rakyat yang memaki, mengumpat dan semua kata-kata kasar keluar. Kang Yoto dan semua pejabat SKPD menerima dengan hati dan tangan terbuka. Keterbukaan pemerintah Bojonegoro bukan hanya dialog Jumat saja. Namun, bupati juga

membuka SMS. Rakyat bebas SMS bupati selama 24 jam. SMS ini disambut luar biasa oleh rakyat.

Bukan hanya pujian, tapi juga protes bahkan cacian terkait pembangunan diterima oleh Kang Yoto melalui SMS. Oleh Kang Yoto SMS dari rakyat itu langsung dikirim ke kepala SKPD. Lalu oleh SKPD direspons dan ditindaklanjuti.

Saking banyaknya SMS, ponsel bupati berkali-kali rusak. Namun, ponsel rusak bukan masalah. Yang penting, aspirasi rakyat tersalurkan. Lebih penting adalah ruang dialog bersama rakyat selalu terbuka.

Sejarah Masa Lalu, Sejarah Kemiskinan

Tulisan ini mengangkat proses transformasi Bojonegoro dari sebuah kabupaten yang kecil dan miskin, menjadi sebuah kabupaten bisa berdiri tegak dengan kemandirian dan kerja keras pemerintah dan masyarakatnya. Transformasi ini merupakan proses panjang dari titik minus, nol, dan plus. Minus adalah masa lalu, nol adalah proses pembangunan masa kini, dan plus adalah Bojonegoro pada masa depan.

Masa lalu, dimana banyak hal yang masih dibawah standar pada 2008. Kondisi jalan 80 persen rusak, tingkat kemiskinan 18,78 persen, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan pengelolaan bencana yang belum optimal. Hal itu harus didorong dengan berbagai strategi hingga tercapai normal.

Masa depan, pelaksanaan berbagai strategi pembanguann yang memiliki nilai tambah. Kalau pada posisi minus dan nol adalah bagian investasi, maka posisi plus harus menjadi

hasil kerja yang dapat 'dijual', dirasakan untuk peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai bidang. Termasuk mengoptimalkan potensi Bengawan Solo.

Bengawan Solo juga yang menghantarkan Sasradilaga menyerang Rajekwesi yang dikuasai Belanda. Lalu Belanda dipukul mundur. Terjadi genjatan senjata. Belanda akhirnya mengganti nama Rajekwesi dengan nama Bojonegoro. Kekalahan yang memalukan Belanda lalu membuat Belanda mengganti nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro.

Lalu mengapa Belanda tertarik menguasai Bojonegoro? Jawabnya karena Bojonegoro memiliki sumber daya alam melimpah. Bojonegoro memiliki minyak, jati, tembakau, dan lahan yang subur saat itu. Kesuburan lahan itu disebabkan adanya Bengawan Solo, dan kecocokan lahan ditanami tanaman yang produktif dan diminati pasar Eropa saat itu, seperti jati dan tembakau.

Meski berlimpah sumber daya alam, masyarakat Bojonegoro masa lalu masih terjat kemiskinan, pemerintahan yang tidak berpihak rakyat. Akibatnya, hingga 2007 Bojonegoro adalah kabupaten termiskin nomer 3 di Jawa Timur (BPS, 2007). Bahkan CLM Penders dalam bukunya *Endemic Poverty Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia* menyebutkan bahwa kemiskinan Bojonegoro sudah sangat mewabah. Tanah yang gersang dan sulit ditanami tumbuhan, tanaman di bantaran Bengawan Solo yang diterjang banjir.

Penders mengilustrasikan bahwa kemiskinan di Bojonegoro pada 1900-1940 seperti kemiskinan oleh warga Rangkasbitung di Lebak dalam buku *Max Havelaar* karya Multatuli. Dimana-mana rakyat miskin.

Bahkan saat zaman pembangunan orde baru, Bojonegoro nyaris tak tersentuh pembangunan yang berarti. Rakyat masih miskin, infrastruktur jalan yang rusak desa dan lingkungan.

Sejarah Kemiskinan dan Sustainable Development Bojonegoro

Dalam literatur kolonial Belanda, Bojonegoro selalu digambarkan sebagai salah satu daerah termiskin dan paling terbelakang di Jawa. Tanahnya tandus dan hampir tidak ada irigasi. Lahan pertanian Bojonegoro berkualitas buruk. Daerah yang subur di dekat Bengawan Solo juga sering menjadi sia-sia terkena banjir selama musim hujan. (CLM Penders (1984).

Pertanyaan mendasar sesungguhnya adalah, darimana sebenarnya akar kemiskinan di Bojonegoro? Catatan CLM Penders dalam bukunya *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North East Java Indonesia*. Dalam versi Indonesia yang diterjemahkan secara pribadi oleh Albard Khan, buku itu berjudul *Bojonegoro 1900-1942 Kisah Kemiskinan Endemik Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*.

Kemiskinan seperti telah menjadi bagian dari sejarah Bojonegoro. Dari dulu tanah Bojonegoro dikenal tandus karena mengandung kapur. Bukan hanya itu, persoalan banjir ternyata bukan hanya dalam dekade terakhir ini saja. Namun, sudah ada sejak akhir abad 18 dan diawal abad 19.

Ironisnya, Penders dalam salah satu bab dalam buku itu menyebut kondisi Bojonegoro seperti di Lebak, Jawa Barat. Jika Anda pernah membaca buku *Max Havelaar* karya Multatuli atawa Douwes Dekker maka Anda tahu cerita kemiskinan yang dialami Saijah dan Adinda di Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Miskin, terlantar dan dieksploitasi oleh VOC.

Namun, Bojonegoro agak beruntung dibandingkan

Rangkasbitung, tanah yang tandus karena berkapur masih menjadi berkah bagi masyarakat. Lahan yang keras itu ternyata cocok untuk palawija seperti jagung dan tembakau. Dalam catatan Penders, tanaman tembakau yang menjadi andalan Bojonegoro diperkirakan telah ada sejak abad 16. Tanaman itu dibawa oleh Portugis saat ke Indonesia.

Dalam catatan Penders menyebutkan, pemerintahan kolonial Belanda telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan masyarakat Bojonegoro dari jerat kemiskinan. Namun, pemerintah Belanda mengakui belum mampu menyejahterahkan rakyat Bojonegoro. Penyebabnya sederhana, mental birokrat yang bobrok dan kepicikan kaum pribumi. Kekayaan alam sebelum ditemukan minyak pada zaman kolonial yang melimpah, seperti hutan jati dan tembakau ternyata belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Bahkan, rakyat terjat dalam belitan renternir Belanda dan pribumi kaya saat itu.

Kita tidak tahu alasan persis Penders mengkaji kemiskinan Bojonegoro. Mengapa Penders tidak mengkaji Lamongan atau Tuban? Mengapa Bojonegoro? Hingga tuntas membaca catatan Penders, kita tak menemukan alasan baik secara sosiologis maupun kultural mengkaji Bojonegoro. Hanya di kata pengantar buku itu, Penders menyebutkan bahwa arsip yang berkaitan Bojonegoro di Departemen Tanah Jajahan Belanda jumlahnya sangat melimpah. Artinya, sebagai sebuah kajian keilmuan semata, arsip dan data sangat memadai sebagai bahan tulisan.

Ada sejumlah penyebab Bojonegoro mengalami kemiskinan yang hebat saat itu, diantaranya minimnya irigasi, diskriminasi pendidikan, dan terjat utang yang menumpuk kepada renternir.

Namun, bagi kami, Penders juga harus menambahi penyebab kemiskinan adalah ketidakadilan. Ada diskriminasi kelas, antara priyayi dan rakyat jelata.

Penerapan kebijakan Politik Etis oleh Belanda sempat menyelamatkan Bojonegoro. Di bidang pertanian, Belanda membuat irigasi dengan membangun waduk Pacal pada 30 Agustus 1927 yang menelan biaya hingga 1,2 juta gulden. Di bidang pendidikan yang berhak menikmati pendidikan adalah anak-anak priyayi dan orang kaya. Sedangkan anak orang miskin dilarang sekolah.

Di sisi lain Belanda juga mengenalkan sistem pembayaran berupa uang kepada rakyat Bojonegoro. Bukan hanya mengenalkan, Belanda juga meminjamkan uang melalui bank. Banyak rakyat tergiur meminjam uang di bank. Penders mencatat, Belanda memberikan pinjaman benih padi kepada rakyat di Baureno senilai 13 ribu gulden. Tapi, pinjaman itu terancam tak dapat dikembalikan karena kondisi cuaca yang tak menentu.

Belanda akhirnya memberi pekerjaan kepada warga Baureno agar dapat mengembalikan pinjaman. Yakni, mengangkut batu dari Gunung Pegat (lintasan Pegunungan Kendeng di Bojonegoro) untuk membangun jalan. Jika tak keliru, Gunung Pegat berada di jalur Babat-Jombang. Hingga sekarang sisa-sisa peninggalan Belanda masih ada di Gunung Pegat yang membujur hingga Desa Gunungsari Baureno.

Rakyat yang rata-rata petani terjerat utang karena bunga bank sangat tinggi. Penyebabnya, hasil dari pertanian impas bahkan kurang dari hasil pertanian yang diperoleh. Bukan hanya itu pejabat kolonial dan administrasi bank juga banyak yang korup. Sehingga makin mencekik rakyat Bojonegoro yang meminjam uang kepada bank.

Dalam kesempatan perbincangan, Bupati Bojonegoro Suyoto mengaku dirinya berkaca dari buku Penders itu untuk mengambil

kebijakan politik kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Bentuk kemiskinan pada zaman kolonial yang dialami rakyat Bojonegoro seperti dalam catatan Penders tak jauh berbeda dengan terjadi saat ini. Beruntung kebijakan Belanda saat itu masih ada yang berpihak kepada rakyat. Yakni, dengan membangun waduk Pacal. Pertanian Bojonegoro pun hingga kini terselamatkan.

Belanda juga membangun transportasi kereta api. Beruntungnya Bojonegoro termasuk stasiun besar. Jadi sebagai stasiun utama. Jalur KA inilah digunakan untuk mengangkut jati, tembakau dan hasil perkebunan lainnya ke Semarang. Dari Semarang lalu dikirim ke Eropa.

Bukan hanya itu, mengentaskan kemiskinan juga bukan soal memberikan pancing dan kail. Tapi, bagi kita, adalah memperbaiki mental. Dari mental peminta menjadi pendaki. Untuk itu butuh revolusi kebudayaan. Ujungnya adalah menjadikan warga ini bermental pemberi. Dalam bahasa agama, adalah sedekah. Semakin banyak kita memberi maka semakin banyak kita akan menerima.

Namun, lagi-lagi urusan revolusi kebudayaan bukan hanya fisik, tapi mental. Karena kegagalan kolonial Belanda saat itu bukan karena kebijakan yang buruk tapi mental birokrat, legislator serta priyayi yang buruk dan korup. Kalau mental peminta baik birokrat, legislator maupun rakyatnya ini masih belum berkurang maka revolusi kebudayaan pun tinggal papan nama.

Penanganan kemiskinan bukan sekadar slogan dan retorika serta angka saja. Namun, butuh langkah kongkret yang langsung dirasakan masyarakat. Hal yang lebih penting adalah menciptakan birokrat yang bersih dan benar-benar melayani rakyat.

Bojonegoro Masa Kini

Pada Maret 2008 melalui pilkada langsung dan demokratis, Suyoto atau akrab yang dipanggil Kang Yoto terpilih sebagai bupati. Kang Yoto dan Kang Hartono yang hanya didukung 7 kursi di DPRD, mampu mengalahkan calon incumbent yang diusung oleh lebih dari 14 kursi. Pilkada yang langsung dipilih rakyat mampu menjaring pemilih yang berbobot. Siapapun memiliki peluang untuk mengabdikan kepada rakyat. Pilkada langsung inilah yang membuat Kang Yoto berkomitmen langsung kepada rakyat.

Komitmen pertama adalah menjamin para birokrasi bekerja keras melayani rakyat.

Komitmen kedua adalah menjamin bahwa anggaran untuk kepentingan rakyat.

Komitmen ketiga adalah transparan semua kebijakan dan rakyat dapat bertemu langsung bupati. Salah satu program transparansi kebijakan tersebut, yakni Dialog Jumat yang sudah mulai periode pertama hingga periode kedua kepemimpinan Kang Yoto saat ini.

Perbaikan pertama yang dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur jalan rusak. Pilihannya adalah menggunakan paving. Mengapa paving? Karena paving cocok dengan tanah Bojonegoro yang bergerak. Bukan hanya itu, pengerjaan paving juga membuka lapangan pekerjaan yang luas kepada masyarakat.

Hasilnya dari jalan poros desa hingga kabupaten yang rusak, kini tinggal sekitar 10 persen.

Bukan hanya jalan raya saja yang diperbaiki. Kini ke akses ke Bojonegoro jauh lebih mudah dan cepat. Salah satunya, jalur rel ganda yang melalui Bojonegoro. Dari Jakarta ke Bojonegoro

naik kereta jauh lebih nyaman dan cepat dibandingkan dulu.

Penguatan ekonomi kreatif dilakukan. Salah satunya pengembangan batik yang khas Bojonegoro mulai dikenalkan. Muncullah warga yang memproduksi batik Jonegoro. Batik Jonegoro mulai diminati warga Bojonegoro. Wong Jonegoro merasa bangga menggunakan batik Jonegoro. Batik Jonegoro juga sudah menjadi seragam wajib bagi siswa dan para pegawai. Batik Jonegoro menjadi kebanggaan warga Bojonegoro.

Warga Bojonegoro yang dikenal ulet dan pekerja keras tak menyerah begitu saja dengan kondisi alam yang keras Pertanian juga mulai tumbuh pesat dengan adanya embung di berbagai pelosok Bojonegoro. Bukan hanya padi saja, tapi juga tanaman lain, seperti jagung, kedelai, bawang merah menjadi komoditas yang dihasilkan warga Bojonegoro.

Berkah migas juga membawa dampak positif yang signifikan kepada Bojonegoro. Efek domino ekonomi dari migas menumbuhkan ekonomi baru bagi Bojonegoro. Dari mulai usaha hotel, restoran, UMKM tumbuh, dan usaha lain yang menyerap tenaga kerja yang tak sedikit.

Keberhasilan ekonomi Bojonegoro yang terus tumbuh juga didukung oleh kebersamaan warga Bojonegoro yang plural. Bojonegoro yang sejak dulu menjadi wilayah jalur ekonomi melalui Bengawan Solo didatangi oleh berbagai warga yang memiliki latar beragam. Kondisi Bojonegoro yang plural dan warganya mampu hidup harmonis inilah yang menjadi modal sosial berharga dalam pembangunan di Bojonegoro.

Kerja keras pemerintah dan masyarakat Bojonegoro ini tak sia-sia. Bojonegoro mendapatkan berbagai prestasi, bukan hanya regional, dan nasional tapi juga di tingkat internasional. Termasuk terpilih *Open Government Partnership* (OGP). Bukan hanya mewakili Indonesia saja. Tapi juga mewakili Asia Tenggara.



Pintu-Pintu Keterbukaan

A. Dialog Publik

Masa Reformasi menghendaki banyak perubahan terutama dalam tata kelola pemerintahan. Salah satunya yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak lagi menerapkan model dari atas ke bawah (*top down*) melainkan menerapkan model dari bawah ke atas (*bottom up*).

Di masa Reformasi ini pula kemudian lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP. Produk hukum ini dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada 30 April 2008 dan mulai diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Tujuan diberlakukannya UU KIP yakni menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selain itu, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Sejak periode pertama pemerintahannya, Bupati Bojonegoro



Suyoto dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik tersebut. Proses dialogis antara pemerintah daerah dengan masyarakat diwadahi dalam sebuah forum yang disebut Dialog Interaktif yang digelar setiap hari Jumat mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Meski UU KIP belum efektif diberlakukan, Kang Yoto sapaan Bupati Bojonegoro, Suyoto, sudah menerjemahkan esensi undang-undang tersebut dengan menggelar Dialog Interaktif yang pertama kali digelar pada Jumat, 14 Maret 2008. Tidak lama setelah Kang Yoto dan Setyo Hartono dilantik, duet ini langsung bertemu dan berdialog dengan masyarakat melalui Dialog Interaktif tersebut.

Dialog interaktif ini merupakan salah satu metode yang paling berkualitas dalam menyerap aspirasi masyarakat dan bahan untuk mengambil keputusan. Mekanisme yang diterapkan juga sederhana yakni siapa pun warga Bojonegoro boleh bertanya, menyampaikan pendapat, gagasan, kritik, dan masukan pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kemudian, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Dinas, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait langsung menyampaikan tanggapan dan jawaban terkait pertanyaan atau kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Proses timbal balik terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Dialog interaktif ini dirasa efektif untuk memahami perasaan dan pikiran masyarakat Bojonegoro sehingga dialog ini dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan Kang Yoto dan Setyo Hartono.

Dari pengamatan dialog interaktif pada edisi ke-139, Jumat, 13 Mei 2016, di Pendapa Malowopati Pemkab Bojonegoro misalnya tampak dialog dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Sekitar 50 warga hadir. Mereka sebelumnya mengisi form daftar hadir yang disediakan di salah satu meja. Selain itu, pegawai lingkup Pemkab Bojonegoro juga hadir. Mereka juga mengisi form daftar hadir yang telah disediakan. Namun, untuk pegawai disediakan form lebih terperinci misalnya dari Sekretariat Kabupaten Bojonegoro, bagian, badan, atau dinas. Dengan begitu, terlihat siapa saja masyarakat yang hadir dan juga pegawai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana saja yang hadir.

Form kehadiran ini mempermudah bagi fasilitator dialog interaktif untuk mengecek kepesertaan dan memilah persoalan yang sedang dibahas. Tempat duduk antara masyarakat dengan pegawai tidak dipisah. Peserta dialog duduk menghadap

narasumber dan fasilitator. Masyarakat yang bertanya atau menyampaikan pendapat maju ke depan.

Dialog interaktif edisi ke-139 itu dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, Kepala Dinas Pertanian, dan perwakilan Dinas Perhubungan. Bupati Suyoto dan beberapa orang dari dinas berada di kursi yang menghadap ke narasumber dan masyarakat. Dengan posisi duduk yang demikian membuat proses dialog interaktif saling bertatap muka. Ekspresi dari masyarakat yang menyampaikan pendapat atau bertanya bisa terlihat jelas. Begitu pula, pegawai dari dinas yang memberikan tanggapan atau jawaban juga terlihat jelas ekspresinya.

Pada dialog interaktif edisi itu tema yang diangkat adalah soal pertanian dan perhubungan. Namun, saat dialog interaktif berlangsung persoalan yang diangkat beragam. Fasilitator dialog interaktif memberikan kesempatan pada masyarakat yang hadir untuk menyampaikan pendapat, gagasan, pertanyaan, dan lainnya.

Nasir, warga Desa Bangilan, Kecamatan Kapas, kemudian maju ke depan dan menyampaikan soal pengelolaan Alun-Alun Bojonegoro. Menurutnya, Alun-Alun Bojonegoro saat ini memang tertata dengan bersih, nyaman, dan rapi. Akan tetapi, kata dia, Alun-Alun Bojonegoro seolah bukan lagi menjadi tempat berkumpulnya masyarakat karena pada jam-jam tertentu pintu masuk Alun-Alun Bojonegoro dikunci.

“Baru di Bojonegoro ada alun-alun yang dikunci pintu masuknya. Jadi, alun-alun terlihat seperti hanya boleh dilihat tetapi tak boleh dimasuki,” keluhnya.

Nasir berharap pihak Pemkab Bojonegoro mengubah

kebijakan soal penutupan Alun-Alun Bojonegoro tersebut. Ia menilai alun-alun merupakan tempat berkumpulnya masyarakat dan melakukan berbagai kegiatan yang positif. “Masyarakat banyak bisa memanfaatkan alun-alun itu,” ujarnya.

Selanjutnya, Kusnan, warga Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, maju ke depan dan menyampaikan pertanyaan soal pemberian dana bantuan bagi anak sekolah dari keluarga miskin. Sebab, kata dia, banyak anak di desanya yang masih sekolah dan dari keluarga miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan biaya sekolah itu.



“Ada anak sekolah di kampung saya itu yang kondisi keluarganya tidak mampu. Tetapi, dia sama sekali tidak mendapatkan bantuan biaya sekolah. Sementara, ada anak lain dari keluarga mampu tetapi malah mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Tetapi, dialog interaktif tidak selalu berisi pertanyaan atau unek-unek dari warga saja. Ada pula yang menjadikan dialog interaktif sebagai ajang menyampaikan ucapan terima kasih atau ajang promosi. Misalnya, Sanawi, dari perkumpulan disabilitas Kabupaten Bojonegoro. Ia di hadapan peserta dialog interaktif menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Bojonegoro, Suyoto, dan Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, karena selama ini mendapatkan perhatian dan bimbingan. Sehingga, kata dia, orang-orang yang menderita kecacatan atau disabilitas mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan tetap berprestasi di tengah masyarakat.

Ada pula Mamik, salah seorang pelukis dan pematung dari Bojonegoro yang hadir di acara dialog interaktif itu. Ia membawa beberapa karya lukis dan patung. Ia salah satu seniman di Bojonegoro yang bisa melukis sketsa wajah orang, alam, dan juga pematung. Pada kesempatan itu, Mamik menyampaikan ingin menjual sejumlah karya lukisnya untuk membiayai anaknya yang menderita kanker mulut. Anaknya itu telah dioperasi di rumah sakit dr Soetomo Surabaya beberapa waktu lalu. Namun, penyakit kanker yang diderita anaknya itu kambuh lagi dan kini memerlukan pengobatan lagi.

Tidak berapa lama kemudian, tampil ke depan Ali, penyandang tuna netra. Ia berjalan ke depan sambil meraba

keadaan dengan tongkat yang ia pegang. Ia dibantu oleh salah seorang temannya. Meski menyandang tuna netra rupanya Ali mengikuti perkembangan dialog interaktif tersebut melalui radio Malowopati FM setiap hari Jumat. Ia pun menyampaikan pendapat dan pertanyaannya mengenai sejumlah persoalan di Bojonegoro menyangkut sektor koperasi, pendidikan, pariwisata, dan lainnya.

Hingga waktu yang disediakan oleh fasilitator tercatat ada 10 pertanyaan, pendapat, dan apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pertanyaan dan pendapat itu secara cermat ditulis dan dipelajari oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto. Namun, sebelumnya masing-masing pertanyaan dan pendapat itu dijawab oleh bagian, badan, atau dinas terkait.

Setelah itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, menanggapi satu per satu pertanyaan dan pendapat yang diadukan oleh masyarakat yang hadir dalam dialog interaktif tersebut. Menanggapi sejumlah pertanyaan itu, Kang Yoto, sapaan Suyoto, menyampaikan bahwa pemerintah itu mengambil keputusan berdasarkan manfaat bagi orang banyak, bukan dari yang sedikit.

“Nah, yang sedikit itu tetap diakomodasi tetapi ya ruangnya beda,” ujarnya.

Kang Yoto dalam kesempatan itu juga menyampaikan capaian yang telah diraih oleh Bojonegoro selama kepemimpinannya yaitu ketahanan pangan dengan menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan, ketahanan energi yaitu Bojonegoro sebagai lumbung energi bagi negeri di mana produksi minyak mentah nasional saat ini sekitar 20 persen dipasok oleh Bojonegoro. Selain itu, kata Kang Yoto, Bojonegoro juga meraih prestasi sebagai daerah yang menerapkan open government,



daerah yang sanggup menghadapi bencana dan berhasil meraih penghargaan tingkat nasional, prestasi di bidang teknologi, daerah yang ramah terhadap hak asasi manusia, berhasil melakukan revolusi mental sejak 2008, dan menerapkan pembangunan berkelanjutan.

“Capaian itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa keterlibatan penuh dari masyarakat Bojonegoro,” ujar Kang Yoto.

Menurutnya, siapa pun yang akan menggantikan posisinya sebagai Bupati Bojonegoro dia berharap bisa melanjutkan program itu terutama melanjutkan reformasi birokrasi,



mengamankan dana cadangan minyak dan gas bumi untuk generasi mendatang, membangun perekonomian berbasis pedesaan, dan meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Bojonegoro.

Menurut Kang Yoto, sebagai daerah yang kaya minyak dan gas bumi kini Bojonegoro banyak dilirik oleh perusahaan. Investasi yang masuk di Bojonegoro bisa menumbuhkan perekonomian Bojonegoro. Akan tetapi, kata dia, pertumbuhan ekonomi itu juga harus diimbangi dengan pemerataan ekonomi.

“Pemerintah akan mendorong yang lemah untuk maju dan berkembang, tetapi juga memberikan kesempatan perusahaan untuk tumbuh berkembang juga,” ujarnya.

Menurut Kang Yoto, pencapaian yang diperoleh Bojonegoro selama ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Salah satu kunci keberhasilan membangun Bojonegoro ini adalah partisipasi masyarakat melalui dialog interaktif yang telah berlangsung sejak 2008 hingga 2016 ini. Pada awalnya, kata Kang Yoto, dalam dialog interaktif itu dijadikan oleh masyarakat untuk mengadukan banyak hal dan cenderung emosional dan marah-marah. Kemudian, kata dia, seiring dengan proses yang terus berjalan dialog interaktif itu dijadikan sebagai ajang debat, adu argumen.

Menurutnya, gagasan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dalam dialog interaktif ini menjadi landasan atau dasar bagi Pemkab Bojonegoro untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan juga mengambil keputusan yang tepat.

“Dialog interaktif ini harus tetap dilanjutkan meski saya tidak lagi menjabat sebagai bupati. Dialog interaktif ini adalah model komunikasi dan interaksi berkualitas antara masyarakat dengan pihak Pemkab Bojonegoro,” ujarnya.

Dialog interaktif di Pendapa Malowopati Bojonegoro dilakukan siaran langsung melalui Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 102,5 FM, serta streaming di Youtube.

Masalah yang paling banyak disampaikan dalam dialog interaktif yang digelar setiap hari Jumat di antaranya :

1. Masalah yang sering disampaikan dalam dialog interaktif selama tahun 2013 yakni infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain.

Pada edisi dialog interaktif Jumat, 22 Februari 2013 misalnya Mahmudi Mulyono, warga Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan tentang tes ujian bagi perangkat desa dan

bagaimana transparansinya. Ia meminta pihak BPMD mengevaluasi tes ujian perangkat desa yang sudah berjalan selama ini. Ia juga mempertanyakan kapan agenda tes perangkat desa itu dilaksanakan. Pertanyaan itu ditanggapi dan dijawab langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.



Data Tanggal 20 May 2016



Data Tanggal 20 May 2016



Data Tanggal 20 May 2016

Ia bekerja sebagai pedagang kaki lima dan mengaku tidak setuju dengan pelebaran jalan itu. Ia meminta Bupati Bojonegoro

memperhatikan nasib pedagang kaki lima. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dan dijawab oleh Bupati Bojonegoro.

Kemudian, pada edisi yang sama Suwarno, warga Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu, menanyakan terkait ditinggikannya tanggul Sungai Bengawan Solo. Ia mengeluhkan proyek itu membuat dirinya kesulitan mengambil bahan batu bata. Ia berharap pihak dinas terkait memperhatikan perajin batu bata. Pertanyaan itu langsung ditanggapi Dinas Pekerjaan Umum dan Bupati Bojonegoro.

Pada edisi dialog interaktif Jumat, 14 Juni 2013, Nur Sukiswo, warga Kedungadem, bertanya soal pembangunan jalan poros kecamatan dan juga mohon ditindaklanjuti saluran pipa PDAM di Jalan Patimura yang bocor. Pertanyaan itu dijawab oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bupati Bojonegoro.

Pada edisi yang sama Aji Setiawan, Kange Yune Bojonegoro, bertanya soal kebijakan bupati mengelola migas di Bojonegoro. Kemudian, ia bertanya bagaimana cara Pemkab Bojonegoro merenovasi tempat wisata agar dikelola lebih menarik, indah, dan bisa menarik wisatawan. Pertanyaan itu ditanggapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bupati Bojonegoro.

2. Masalah yang banyak disampaikan dalam dialog interaktif selama 2014 yakni infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, perhubungan, kesehatan, pertanian, pariwisata dan lain-lain.

Dialog interaktif edisi Jumat, 30 Mei 2014, Suwanto, warga Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, bertanya tentang

pembangunan jalan paving di pedesaan saat ini banyak yang rusak. Penyebabnya, paving itu kurang katel dan tidak sesuai dengan kondisi jalan lingkungan. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dinas terkait dan Bupati Bojonegoro. Bupati mengarahkan jalan paving itu harus selalu diawasi setiap enam bulan sekali, kalau rusak jangan diuruk dengan pedel tetapi diangkat dan diperbaiki lagi. Jalan paving memerlukan gotong royong warga.

Dialog interaktif edisi Jumat, 22 Agustus 2014, Dampri, warga Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, menanyakan soal pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Bojonegoro. Selain itu, ia juga bertanya soal pembangunan Waduk Gongseng dan potensi waduk Pacal agar dikelola sebagai potensi wisata. Pertanyaan itu ditanggapi langsung oleh dinas terkait dan Bupati Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro menyampaikan, terkait pembangunan rumah sakit di wilayah selatan Bojonegoro menjadi kebutuhan untuk melayani kesehatan masyarakat di daerah selatan itu. Terkait lahan yang masih dicari.



Soal pembangunan Waduk Gongseng dianggarkan Rp 400 miliar. Waduk Gongseng akan menampung air untuk persediaan pengairan pertanian di wilayah selatan dan timur Bojonegoro. Waduk Gongseng dan Waduk Pacal diarahkan menjadi potensi wisata.

3. Masalah yang banyak disampaikan dalam dialog interaktif selama 2015 yakni pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, perhubungan, sosial, pertanian dan lain lain.

Pada dialog interaktif edisi Jumat, 06 Maret 2015, Arif Sarifudin, warga Desa Jetak, Kecamatan Bojonegoro, bertanya terkait serangan hama wereng yang sulit diatasi. Ia bercocok tanam padi di Desa Sukorejo. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dinas terkait.

Pada edisi yang sama, Mat Salim, warga Desa Cangkan, Kecamatan Kanor, mengaku merasa was was apabila sewaktu waktu terjadi luapan Bengawan Solo. Ia tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo. Ia minta Pemkab Bojonegoro membangun tanggul dan saluran air untuk membuang air ke sungai. Pertanyaan itu langsung ditanggapi dinas terkait.

Dialog interaktif edisi Jumat, 15 Mei 2015, Djasmani, warga Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, menyampaikan soal pembangunan embung. Di desanya sudah dibangun tiga embung dan akan dibangun satu embung lagi. Tetapi, embung itu rencananya memakai lahan makam. Dia bertanya bagaimana apa boleh membangun embung di pemakaman. Pertanyaan ini langsung ditanggapi dinas terkait.

4. Masalah yang banyak disampaikan dalam dialog interaktif selama 2016 yakni infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan, sosial, dan lain-lain.

Pada dialog interaktif edisi Jumat, 27 Februari 2016, Eko, warga Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, menyampaikan soal zebra cross di depan SMU Dharma Wirawan agar segera dibuat. Sebab, banyak anak-anak sekolah yang menyeberang di jalan itu. Pertanyaan ini langsung ditanggapi oleh dinas terkait.

Pada dialog interaktif edisi Jumat, 18 Maret 2016, Karsono, warga Desa/Kecamatan Kapas, minta agar jalan di sepanjang Semanding-Sambiroto agar diberi penerangan jalan umum. Pertanyaan ini ditanggapi oleh dinas terkait.

Dialog interaktif ini bukan hanya dilakukan di tingkat kabupaten. Namun di tingkat desa juga dilakukan interaktif antara pejabat desa dengan rakyatnya. Salah satunya dialog interaktif di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo.



B. SMS ke Radio

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan gagasan, pendapat, kritik, dan masukan untuk membangun Bojonegoro. Salah satunya yaitu melalui pesan pendek (SMS) yang dikirimkan ke radio Malowopati 98,5 FM Bojonegoro.

Aduan masyarakat itu dapat disampaikan dalam program Cakrawala Pagi Radio Malowopati FM Bojonegoro mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Kemudian, aduan masyarakat juga bisa disampaikan di program selanjutnya yang disebut Ayo Masbro mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.30 WIB. Masyarakat bisa mengirimkan SMS melalui nomor 0821143212958.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Radio Malowopati, Alit Saksama Purnayoga, masyarakat banyak yang menyampaikan keluhan dan aduan terkait pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur di program Cakrawala Pagi dan Ayo Masbro tersebut.

“Iya banyak sekali aduan atau keluhan yang masuk melalui SMS Radio Malowopati FM,” ujarnya.

Menurutnya, dalam program Cakrawala Pagi itu semua aduan atau keluhan masyarakat langsung ditanggapi oleh penyiar radio. Namun, kata dia, SMS aduan itu juga diteruskan ke aplikasi SIAP LAPOR! yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian, apabila keluhan itu tak ditanggapi maka akan ditindaklanjuti dalam rapat management review di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.30

WIB. Rapat manajemen review itu dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto dan Wabup, Setyo Hartono.

“Apabila keluhan atau aduan itu tidak ditanggapi oleh dinas terkait, maka Bupati dan Wabup akan menegur langsung kepala dinas atau kepala SKPD terkait,” ujarnya. Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM sebanyak selama 2015 sebanyak 324 pemohon. Sedangkan, topik layanan informasi yang paling banyak dimohon yakni tentang tentang pemerintahan 40 persen, pelayanan publik 25 persen, kesehatan 15 persen, pendidikan 5 persen, ketenagakerjaan 5 persen, dan lain-lain 10 persen.



SKPD dan narasumber yang dihadirkan pada acara on air radio Malowopati adalah narasumber yang terkait dengan persoalan-persoalan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat sekaligus sebagai bentuk pengejewantahan revolusi mental.

Disamping Radio Malowopati seluruh radio di Bojonegoro, yakni 12 radio terwadahi dalam Forum Radio Bojonegoro (FRB). FRB setiap tiga bulan melakukan pertemuan rutin untuk sharing permasalahan yang berkembang di masyarakat melalui radio masing-masing. Dari Dinas Kominfo menyampaikan informasi terkini berbagai kebijakan pemerintah serta solusi untuk masyarakat. Hal tersebut dapat dipublikasikan secara terbuka dan bebas sesuai gaya radio masing-masing.

C. Blusukan

Blusukan adalah salah satu cara kepala daerah memahami persoalan dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Blusukan memungkinkan pelayan masyarakat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dilayani. Blusukan juga efektif memangkas birokrasi yang panjang dan berbelit yang dilalui kepala daerah bila ingin mengetahui persoalan langsung dari sumber utama. Intinya blusukan adalah cara yang langsung menukik ke masalah yang ingin diselesaikan.

Bupati Bojonegoro, Suyoto atau akrab disapa Kang Yoto, memilih cara blusukan ini untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang berada jauh dari pelayanan publik. Pada masa awal pemerintahannya, Kang Yoto senang blusukan ke desa-desa terpencil di Bojonegoro dengan naik sepeda motor trail. Sepeda motor itu dipilih karena memungkinkan masuk ke daerah dengan medan yang sulit sekali pun. Daerah selatan Bojonegoro seperti Kecamatan Sekar, Gondang, Kecamatan Kasiman, dan Kedewan di wilayah barat Bojonegoro kondisi geografisnya berupa perbukitan dan pegunungan. Blusukan dengan naik sepeda motor memungkinkan Kang Yoto bisa masuk dan menjangkau daerah pedalaman.

Saat blusukan itu, Kang Yoto menggali aspirasi masyarakat. Berkomunikasi dan berinteraksi gayeng dengan mereka. Gaya komunikasi Kang Yoto yang santai, berempati, tetapi bermakna itu membuat jarak antara pejabat dengan rakyat seolah tidak ada lagi. Masyarakat bisa secara terbuka dan nyaman menyampaikan aspirasinya.



“Saat blusukan itu, saya mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat di pedesaan. Negara hadir untuk melindungi dan melayani masyarakat, di mana pun mereka berada,” ujar Kang Yoto. Namun, kata dia, blusukan itu tidak selalu diterapkan. Pendekatan personal yang mengandalkan ketokohan diubah dengan pendekatan sistem. Kang Yoto berusaha melakukan transformasi dari pendekatan personal ke pendekatan sistem. Dengan demikian, persoalan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa diselesaikan secara tuntas yang melibatkan seluruh SKPD terkait.

Tetapi, kata dia, adakalanya blusukan masih perlu dilakukan. Misalnya bila ada kejadian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Kang Yoto berusaha selalu hadir di tengah masyarakat yang dilanda bencana itu dan berupaya membantu dan mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

D. SIAP LAPOR !

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro merespon pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berlangsung saat ini. Tidak dipungkiri masyarakat kini terbiasa memakai berbagai saluran komunikasi untuk berkomunikasi melalui media sosial, pesan pendek (SMS), telepon seluler, dan juga website. Cara-cara lama berkomunikasi juga mulai ditinggalkan.

Seiring perkembangan itulah, Pemkab Bojonegoro memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan informasi untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Menyerap aspirasi, pendapat, masukan, kritik, saran melalui media digital yang berkembang saat ini.

Sejak Juli 2014, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) mengembangkan sistem komunikasi dengan masyarakat secara digital yang disebut Sistem Integrasi Aspirasi Publik (SIAP) dengan Layanan Aspirasi Online Rakyat (LAPOR!) dengan website <https://www.lapor.go.id>.

Aplikasi layanan SIAP LAPOR! mengadopsi model layanan komunikasi dan aduan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Namun, Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro kemudian mengembangkannya agar lebih mudah dan bisa menjangkau masyarakat secara luas.

Mekanisme Penyampaian LAPOR!

Masyarakat yang mau menyampaikan aspirasinya baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan,



kesehatan dan lainnya di Bojonegoro bisa dengan mudah menyampaikan lewat aplikasi SIAP LAPOR! ini. Masyarakat bisa menyampaikan lewat pesan pendek (SMS) dengan cara ketik BJK – isi aduan dan kirim ke nomor 1708. Selain itu, masyarakat juga bisa mengirimkan pesan pendek langsung ke nomor telepon HALO BUPATI di nomor 08113445999. Pesan atau isi aduan yang masuk ke HALO BUPATI ini juga langsung masuk ke admin aplikasi SIAP LAPOR!.

Dinas Kominfo mempunyai standar operasional pelayanan SIAP LAPOR! ini. Sesuai standar itu, kata dia, aduan atau aspirasi masyarakat yang masuk ke admin SIAP LAPOR! harus



segera diproses paling lama tiga hari. Selanjutnya, aduan atau aspirasi itu akan dipilah berdasarkan isinya atau kategorinya. Aduan itu kemudian diteruskan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Misalnya, kalau aduannya terkait jalan yang rusak atau jembatan rusak maka akan diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kalau aduannya terkait biaya sekolah akan diteruskan ke Dinas Pendidikan. Begitu pula kalau aduannya terkait pelayanan kesehatan akan diteruskan ke Dinas Kesehatan.



SKPD yang mendapatkan aduan itu, mempunyai waktu lima hari untuk merespon dan menindaklanjuti aduan tersebut. Apabila setelah lima hari aduan itu tidak direspon maka secara otomatis sistem memberikan *early warning system*. Jika aduan yang masuk ke SKPD itu direspon namun tindak lanjutnya belum tuntas, *early warning system*

maka akan diberi tanda kuning. Sedangkan, jika aduan tersebut direspon dan ditindaklanjuti maka akan diberi tanda biru. Artinya aduan itu telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

“Misalnya ada aduan soal usulan perbaikan jalan poros desa, tetapi kemudian direspon masih dianggarkan, maka otomatis akan ada tanda kuning. Artinya belum ditindaklanjuti, terintrepretasikan.

Sejak layanan aplikasi SIAP LAPOR! itu dibuka antusiasme masyarakat untuk mengadu berbagai persoalan publik cukup banyak. Selama Juli – Desember 2014 jumlah aduan yang masuk di admin LAPOR! sekitar 20-70 aduan per bulan. Selama

REKAP LAPOR! 1708						
Bulan Oktober 2016						
No	Nid	Usel	Tangg	Klasifik	Kecam	Desa
				Disposisi	to	Judul_Laporan
				Tindak Lanjut /Isi_Laporan		
1	1590295		01 October 2016 07:02:02			
			Pengaduan			
Topik : Perhubungan						
			07 October 2016 07:56:50			
			Pengaduan			
2	1590580		01 October 2016 21:42:03			
			Pengaduan			
3	1590584		01 October 2016 21:54:02			
			Pengaduan			
Topik : Pertambangan						
			03 October 2016 17:04:53			
4	1590798		02 October 2016 18:44:45			
			Pengaduan			

2014 jumlah aduan yang masuk di admin LAPOR! rata-rata sebanyak 40-300 aduan per bulan. Sedangkan, sejak Januari-Mei 2016 tercatat rata-rata aduan yang masuk di admin LAPOR! sebanyak 70-300 aduan per bulan.

Topik yang paling banyak diadukan yakni masalah infrastruktur, pemerintahan, pendidikan, perhubungan, lingkungan hidup dan penanggulangan kebencanaan, kesejahteraan rakyat, dan kesehatan.

Selain itu, topik lain yang banyak diadukan yakni pertanian, pertanahan dan permukiman, dan ketenagakerjaan.



Implementasi Pemerintah Bojonegoro Menuju Keterbukaan

A. Dampak Dialog Publik dan Demokrasi Kecil Bojonegoro

Bupati Bojonegoro Suyoto, menyelinap masuk di rumah dinas yang telah dipenuhi sejumlah pejabat di areal Kantor Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Sempat diskusi sebentar dengan beberapa kepala dinas, lalu Kang Yoto, panggilan pria asal Desa Bakung, Kecamatan Kanor ini, keluar dan tampil di depan puluhan warga yang sudah menunggu di Pendopo Malowopati.

Kebetulan ini hari Jumat, dimana ada panggung kecil antara Bupati Bojonegoro, pejabat pemerintah, dan masyarakat dari pelbagai kalangan, di Pendopo Malowopati. Nama panggung kecil itu, bernama Dialog Publik yang digelar tiap hari Jumat di pendapa. Gagasan Dialog Publik ini, merujuk dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Serta diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Bojonegoro.

Jika kerap mengikuti Dialog Publik Jumat ini, nyaris tidak ada tokoh sentral. Dalam rentang waktunya lebih dari dua jam, yang ada adalah komunikasi dua arah, yaitu komunikator-komunikan, dan proses pesan yang muncul dinamis bisa dibahas bersama. Tepatnya, antara Pemerintah Bojonegoro, praktisi dan tentu saja masyarakat yang berpartisipasi mengemukakan pendapatnya. Ada usul, saran, dan tentu kritik di dalamnya. Forum bebas warga ini, tentu punya banyak tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan.

Meski berposisi sebagai Bupati, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik ini, tak serta-merta mendominasi forum. Forum lebih banyak dikuasai warga yang bersemangat menyala-nyala dan tertuju ke Pemerintah Bojonegoro. Justru Kang Yoto lebih memilih banyak mendengar dan masukan dari masyarakat. Forum diskusipun pun jadi benar-benar hidup karena Bupati lebih memilih menjadi moderator, meski kemudian di bagian akhir mengambil keputusan. “Belajarlah jadi pendengar yang baik,” ujarnya suatu ketika.

Forum Dialog Publik dimulai tahun 2008, dengan tema enteng-entengan dan tak lepas dari problematika keseharian di Bojonegoro. Misalnya, pada Jumat pertama, temanya menyangkut masalah infrastruktur, atau tema lain seperti evaluasi jalan-desa desa, poros kecamatan hingga jalan kabupaten. Usulan jalan dengan paving di perkampungan dan desa di Bojonegoro, kabarnya juga datang dari diskusi dan usulan di Dialog Publik Jumat.



Berikutnya, pada pekan Jumat lainnya, bisa membahas masalah pertanian, peternakan, hingga masalah layanan publik. Seperti layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Bojonegoro, layanan Kartu Tanda Penduduk. Pun juga menyangkut anak-anak putus sekolah, beasiswa anak-anak pintar tapi tidak mampu secara ekonomi, serta dunia pendidikan lain di kabupaten ini.

Masyarakat dari berbagai kelompok masyarakat datang langsung ke Pendopo Malowopati. Ada pebisnis, kelompok komunitas, birokrat, petani juga peternak. Terhitung dari awal digelarnya tahun 2008, warga yang datang sudah merata dari 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan di Kabupaten ini. Mereka datang dengan berbagai tujuan dari pelosok kampung yang jauh dari perkotaan. Seperti Desa Drokilo Kecamatan Kedungadem, dimana warga beberapa desa di Kecamatan Kedungadem bisa berdiskusi soal pelbagai hal. Misalnya menyangkut pertanian bawang merah, embung dan pertanian. Selain itu, warga komunitas Sedulur Sikep—kampung Samin—dari Dusun Jepang Desa/Kecamatan Margomulyo yang berjarak sekitar 68 kilometer barat daya Kota Bojonegoro, juga kerap datang berdiskusi, di antaranya tokoh Samin, Mbah Hardjo Kardi.

Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur Mahbub Junaidi mengatakan, telah beberapa kali diundang mengikuti Dialog Publik di Pendopo Malowopati Bojonegoro tiap hari Jumat. Yang datang dari pelbagai kelompok masyarakat, seperti professional, pelaku usaha dan masyarakat bawah. Dialognya terbuka, spontanitas dan tentu saja disampaikan langsung masyarakat ke pejabat Bojonegoro. "Ini seperti model kecil demokrasi Bojonegoro," ujarnya suatu ketika.

Mahbub Junaidi berharap, model Dialog Publik Jumat di Bojonegoro bisa ditiru di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur. Karena, dengan model seperti ini, informasi bisa akan produktif.

Lalu-lintas informasinya tidak hanya dari satu sumber, tetapi antara Pemerintah dan masyarakat bisa saling mengisi. Dan yang penting, mempermudah menerapkan visi keterbukaan sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Terus terang ini mempermudah kerja kawan-kawan di Komisi Informasi,” imbuh mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jember ini.

Dampak dialog publik juga menurunkan tensi unjuk rasa di Bojonegoro. Sebelum 2008, hampir tiap pekan ada unjuk rasa. Ketika hampir 8 tahun dialog publik unjuk rasa mengalami penurunan. Data dari Bakesbanglinmaspol menyebutkan, pada 2014 unjuk rasa hanya terjadi 35 kali dalam setahun. Sedangkan pada 2015 terjadi 38 unjuk rasa.

B. Dampak Blusukan dan Ekonomi Kerakyatan

Laju puluhan sepeda motor trail beriringan membelah jalan-jalan Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro. Deru motor dari knalpot kendaraan roda dua ini, adalah rombongan yang di antara deretan itu, terdapat Bupati Bojonegoro, Suyoto dan beberapa pejabat. “Ini blusukan gaya nyata. Karena tempatnya jauh dari perkotaan,” ujar Kang Yoto, panggilan akrabnya.

Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, adalah satu dari 430 desa/kelurahan di Bojonegoro yang lokasinya kebetulan berada di pinggiran Kabupaten Bojonegoro. Desa yang berjarak sekitar tujuh kilometer dari Kota Kecamatan Tambakrejo ini, sebagian berada di pinggiran hutan milik Perhutani. Sisanya, tanah persawahan tadah hujan dimana petaninya hanya menikmati satu kali panen dalam satu tahun.

Luas Desa Napis hampir 6 kali luas Kota Bojonegoro. Untuk membangun jalan di Napis dibutuhkan dana hampir Rp 300 miliar. Padahal pajak yang disetor warga Napis hanya Rp 78 juta tiap tahun. Karena itu, jika Rp 300 miliar hanya untuk Napis maka alangkah bijak jika untuk membangun desa lainnya di Bojonegoro.

Tujuh tahun silam, Desa Napis, dianggap sebagai daerah terpinggirkan, pra-sejahtera dan terisolir. Dari 11 dusun-dusun di desa ini, satu sama lainnya sebagian masih dibelah hutan jati. Pun juga jalan desanya masih tanah dan makadam. Berdebu jika kemarau dan berlumpur serta susah dilewati saat musim

hujan mengguyur. Tak hanya itu, sebagian dari beberapa dusun di Desa Napis juga belum teraliri listrik. “Pokoknya masih sulit,” ujar Ketua Koperasi Lembu Seto Desa Napis, Agus Purnomo, beberapa waktu lalu.

Namun sekarang ini, nama Desa Napis telah dicatat sekaligus ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai daerah pengembangan pembibitan sapi Peranakan Ongole (PO), terhitung pada awal Juni 2015 silam. Dan peranakan sapi warna putih yang tahan akan cuaca panas ini bibitnya akan disebarluaskan di seluruh Indonesia. Di Kecamatan Tambakrejo, populasi sapi sekarang ini sekitar 14 ribu ekor dan lebih dari 3.000 di antaranya berada di Desa Napis. Konon, hasil blusukan Kang Yoto di dusun-dusun Desa Napis, adalah berhasil memotivasi para anak muda untuk mengembangkan ternak. Peternak di desa itu telah mendapat pengawasan tenaga ahli di Universitas Brawijaya Malang dan Institut Pertanian Bogor.

Ada daerah lain yang juga jadi sasaran para blusukan Kang Yoto, yaitu di areal sumur minyak tradisional di Kecamatan Kedewan, berlokasi di ujung barat daya Kota Bojonegoro. Di beberapa desa di kecamatan ini, seperti Desa Wonocolo, sering jadi sasaran blusukan Kang Yoto. Ditunjang kawasan hutan dengan ketinggian sekitar 300 meter dari permukaan laut, alamnya sangat cantik. Sayang areal sumur minyak tradisional peninggalan Belanda ini tidak tertata. Di sana-sini banyak belepotan tumpahan minyak mentah jadi limbah, kotor dan tentu merusak ekosistem hutan jati.

Padahal sumur tradisional tak hanya di Desa Wonocolo saja, tapi juga tersebar di Desa Hargomulyo dan Beji. Sudah puluhan tahun lamanya, penambangan illegal ini terus-menerus terjadi. Tanpa ada penataan lingkungan juga pengelolaan minyak yang benar, tentu akan terus seperti itu. Pentingnya blusukan Kang Yoto di Kecamatan Kedewan dan sekitarnya banyak menemukan



pelbagai masalah di lapangan. Tak hanya terima data lewat Dialog Publik Jumat, atau terima SMS dan seterusnya, tetapi kemudian ada konfirmasi di lapangan, sebagai bentuk pembuktian pengumpulan data.

Hasil blusukan Kang Yoto dan para pejabat yang mendampingi pada enam tahun silam, sedikitnya menghasilkan 20 daerah potensial di Bojonegoro. Yaitu dari sektor pertanian, agroindustri,

pariwisata dan juga kesenian lokal dan tentu punya potensi untuk dikembangkan. Di antaranya, kebun blimbing Desa Ngringinrejo, kebun jambu merah di Desa Mayanggeneng, serta pusat industri gerabah di Desa Rendeng, ketiganya di Kecamatan Kalitidu.

Tak hanya itu, di Bojonegoro bagian barat, ada pusat industri gembol jati di Desa Geneng Kecamatan Margomulyo dan di Kecamatan Ngraho. Lalu ada industri kerajinan kayu jati dan mebel yang terpusat di Desa Batokan dan Bandar Kecamatan Kasiman dan mebel di Desa Sukorejo Kecamatan Kota Bojonegoro. Untuk, mebel kualitas ekspor, bisa diperoleh di Desa Bandar dan Desa Sukorejo, yang konon sudah diakui sejumlah pejabat dan orang penting di Jakarta. Mulai keluarga Cendana, keluarga mantan Presiden Megawati dan keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ikut membeli produk mebel dari desa-desa tersebut.

Kegiatan blusukan juga mendekatkan Kang Yoto pada rakyat di bawah. Seorang Nenek penjual serabi di Jalan Setyo Budi, Bojonegoro, mengaku sudah tiga kali didatangi Sang Bupati. Awalnya si Nenek tak tahu kalau si pembeli adalah orang nomor satu di kabupaten ini. Karena saat datang membeli serabi, Kang Yoto jalan kaki sendirian lalu menghampiri lapaknya. “Saya tidak tahu kalau yang beli serabi itu Pak Bupati. Saya dirangkul,” ujar nenek yang lokasi lapaknya tepat di depan rumah Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro Iskandar itu.

Jika kemudian, muncul festival makanan khas Bojonegoro, tentu adalah bagian dari hasil blusukan Kang Yoto ke beberapa tempat. Ada jajan ledre khas Kecamatan Padangan pun juga srebeh. Khusus untuk serabi, ada langganan Kang Yoto, yaitu getuk dan serabi Mak Yah di Kali Ketek, Desa Banjarsari, Trucuk,

Bojonegoro. Di warung ini, kerap jadi cangkrukan Kang Yoto dan komunitasnya membicarakan pelbagai hal tentang masa depan Bojonegoro. Ada juga tempat lesehan, yaitu serabi di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kota Bojonegoro.

Jika jalur rombongan sepeda motor trail di kawasan Bojonegoro bagian selatan, seperti Temayang dan Gondang, maka lokasi mangkalnya juga beda. Di jalur ini ada Warung Semok Mbak Sum, di pinggir Waduk Temayang, yang menyediakan lalapan ikan sungai. Warung pinggir jalan Raya penghubung Kabupaten Bojonegoro-Nganjuk ini, kerap dijadikan tempat diskusi Kang Yoto, dan sejumlah tokoh di kabupaten ini. Kemudian warung penyet welut bakar Pondok Salak Bu Muryati di Desa Bendo Kecamatan Kapas. Dan tentu saja masih ada tempat lain warung-warung pinggiran yang lambat laun jadi penggerak ekonomi rakyat.

Industri rumahan dan menengah di Bojonegoro, mulai tumbuh subur di pelbagai tempat di kabupaten ini. Pariwisata berbasis alam misalnya, telah muncul dipelbagai tempat. Misalnya saja Air Terjun Kedung Maor di Desa Kedungsumber Kecamatan Temayang, lalu wisata Khayangan Api di Desa Sendanghardjo Kecamatan Ngasem. Kemudian wisata Atas Angin Desa Deling Kecamatan Sekar, juga wisata Dander di Kecamatan Dander. Dan kini masih ada beberapa lokasi wisata yang tengah digarap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro.

Selain itu kesenian tradisional khas Bojonegoro yang hampir punah juga tengah digairahkan lagi. Misalnya, kesenian Kalongking—yang sempat dilarang Orde Baru— yang berpusat di Kelurahan Ledok Kulon, Kota Bojonegoro, kini telah beberapa kali tampil atas undangan Pemerintah. Kemudian kesenian Wayang Thengul yang tersebar di Ngasem, Dander, Purwosari

dan Padangan, juga tengah tumbuh dan kini kerap tampil di panggung pertunjukan.

Bupati Suyoto dalam pidatonya mengatakan, Bojonegoro harus bersemangat meningkatkan pendapatan dari sektor non-migas. Misalnya industri pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan, perlu ditingkatkan. Misalnya sektor pertanian, perlu target satu juta produksi padi tahun 2016 ini. Caranya, yaitu mengoptimalkan dan mengelola air dari Sungai Bengawan Solo. Menampung air di bendungan dan embung saat banjir dan menyalurkan air saat kemarau.

Selain itu, membangun bendungan baru seperti Waduk Gongseng di Kecamatan Temayang dan Waduk Pejok di Kecamatan Kepohbaru. Dua waduk tersebut guna melengkapi Waduk Pacal yang daya tampungnya hanya sekitar 23 juta meterkubik dari idealnya di atas 37 juta meterkubik. Selain itu juga program membuat 1000 embung di daerah potensi kering—terutama Bojonegoro bagian selatan dan barat daya.”Penting mengoptimalkan industri non-migas,” ujar Bupati.

Sedangkan sektor Migas yang kini jadi idola baru perekonomian Bojonegoro, sifatnya hanya sesaat. Karena sumur minyak bersifat sementara dan tentu saja akan habis jika terus-menerus dieksplorasi. Yang juga harus disiasati, bagaimana memanfaatkan pendapatan Dana Bagi Hasil Migas dari Pemerintah Pusat, tidak cepat terkuras habis, tetapi untuk tabungan anak-cucu ke depan. Juga yang terpenting, masyarakat Bojonegoro harus peka dan menangkap multiplayer efek industri migas. “Patut mendapat perhatian,” ujar Bupati.

C. Penegakan HAM, Pemerintahan Terbuka

Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendapat predikat Human Rights City atau sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM), oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 11 Desember 2015 lalu. Kabupaten ini termasuk 138 kabupaten/kota—dari total 514 kabupaten/kota di Tanah Air yang dinilai ramah HAM.

Prestasi membanggakan dari Pemerintah Republik Indonesia ini tentu saja tidak mudah diraih oleh Kabupaten Bojonegoro. Butuh pengorbanan dan proses panjang yang harus dilalui. Karena daerah ini punya banyak pengalaman menarik yang melahirkan pelbagai cerita. Bojonegoro memiliki sejarah kemiskinan dan konflik cukup panjang. Pun juga sejarah konflik yang telah dimulai sejak zaman Majapahit hingga sekarang. Tentu saja kondisi seperti ini butuh kerja keras agar bisa melepas bayang-bayang buruk masa lalu.

Lalu apa peran Pemerintah dalam hal ini? Menurut Kang Yoto, selama Pemerintah belum bisa memberikan solusi, maka pelanggaran HAM tetap rentan menimbulkan radikalisme dan diskriminasi. Hal yang paling mudah pemicunya adalah, terkait munculnya politisasi agama dan etnis. Dengan realitas seperti itu, Pemerintah Bojonegoro berupaya kuat untuk merawat Bojonegoro sebagai kota ramah HAM.

Maka, pada awal-awal menjabat Bupati Bojonegoro tahun 2008, Kang Yoto mulai membangun apa itu yang disebut membangkitkan titik penyadaran akan pentingnya penegakan HAM. Para komponen masyarakat didekati. Lembaga agama dari pelbagai pihak dikumpulkan, dibuka ruang dialog antar-tokoh agama dan masyarakat. Misalnya, Pemerintah Kabupaten mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum beranggotakan tokoh agama ini, Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Tiap muncul adanya potensi konflik, FKUB Bojonegoro efektif menjaga dinamisasi dan tentu kerukunan.

Salah satu hasil yang dirasakan komunikasi yang baik antara Pemerintah dan masyarakat, misalnya pendirian Gereja Bethany di Jalan Sawunggaling Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Maret 2015. Padahal pendirian Gereja ini, yang konon izinnya sudah terkatung-katung sekitar 25 tahun lamanya. Dukungan Pemerintah Bojonegoro diwujudkan dengan menugaskan Kantor Bakesbangpolimas untuk membantu pihak Gereja. Kang Yoto sendiri, membubuhkan tanda tangan saat meresmikan pendirian tempat ibadah tersebut.



Sikap Kang Yoto yang gemar berbagi pada umat juga ditunjukkan kepada anak-anak pengungsi Etnis Rohingya, Myanmar. Ketika itu, Bupati menyatakan siap mengasuh lima hingga 10 anak-anak pengungsi etnis Rohingya, yang berada di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Langsa, pada pertengahan Mei 2015 lalu, lebih karena persoalan kemanusiaan. "Ya, saya ingin mengasuhnya." ujarnya pada wartawan.

Buah kerja keras Pemerintah Bojonegoro dalam menegakkan HAM menghasilkan pelbagai capaian. Setelah meraih prestasi sebagai Kota Ramah HAM, tawaran pun berdatangan. Misalnya Kang Yoto dijadwalkan mempresentasikan keberhasilan Bojonegoro di event Human Right International Conference di Guangco-Korea Selatan bulan Juli 2016. Selain itu Bojonegoro juga mendapat kehormatan, karena Komnas HAM dan lembaga INFID akan melaksanakan Kongres HAM Nasional yang ketiga di Bojonegoro pada Desember 2016.

Menurut Kang Yoto, ada beberapa hal menyangkut resep bagaimana membangun HAM dengan tepat. Yang harus dilakukan adalah, mendahulukan kepentingan publik, hadir pada dinamika publik, menjaga kepercayaan rakyat dan mitra seperti investor, serta bersemangat memiliki tradisi belajar bersama. "Itu syaratnya,"katanya.

Predikat Kota Ramah HAM yang diraih Kabupaten Bojonegoro berbanding lurus dengan prestasi lain. Misalnya, Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro berhasil mengungguli

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1 KELUHAN MASYARAKAT

- Jalan rusak
- Pelayanan kesehatan yang kurang baik
- Biaya pupuk mahal
- PKL semakin merana
- DII.

PUKUP KOK MAHAL AMAT, MAU NANDUR JADI SUSAH

JADI PKL KOK GINE AMAT, HIDUP SUSAH..

JALANNYA JUGA RUSAK, PAS LEWAT JABRIKUKU JADI MELENGKUNG.

NDAK USAH NGRUNDEL SMS SINE AJA.

2 SALURAN ASPIRASI

SMS ke 1708
SMS ke Bupati
SMS ke Radio
Malowopati FM
Datang ke PPID

3 TANGGAPAN ADUAN

- Aduan masyarakat akan ditindak lanjuti oleh SKPD
- SKPD berkoordinasi pihak-pihak terkait
- Laporan akan dibahas untuk segera diproses

4 TINDAK LANJUT ADUAN

Beginitu selesai pembahasan, laporan segera ditindaklanjuti oleh SKPD

WUUIH CEPET BANGET PROSESNYA

MOGA CEPAT SEMBUH YA NEK.

WAH MBAK DAN MAS DOKTERNYA RAMAH, COCOK INI BUAT JADI MANTU.

5 MASYARAKAT PUN SENANG

Keterbukaan informasi publik untuk kesejah teraan masyarakat Bojonegoro.

BOJONEGORO MATOHH..!!

YO'I BROO..

PUKUP MURAH PANEN MELIMPAH, TOOP.

PUKUP

Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh—yang juga masuk nominator.

Yang membanggakan Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia), sebagai percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini. Dikutip opengovindonesia.org

Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI), Raden Siliwanti menyatakan, “Pemerintah pusat harus mampu menangkap, menghargai, dan membantu mengembangkan setiap inovasi kecil yang diprakarsai oleh rekan-rekan di daerah. /Hanya dengan demikian kita mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun instansi pemerintah pusat lainnya. Upaya ini juga sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dikutip opengovindonesia.org

Pihak Sekretariat Nasional (Seknas) Open Government Indonesia (OGI) dibantu koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan *assessment* ke beberapa pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu November 2015-Februari 2016. Tujuannya yaitu, menjaring daerah-daerah yang memiliki contoh baik praktik open government atau pemerintahan terbuka.

Pemerintah Bojonegoro berhasil menang karena beberapa hal. Karena Bojonegoro memiliki sistem dialog publik yang mempertemukan langsung antara kepala daerah dan



masyarakat, Radio Malowopati 95.8 FM dan Turun Desa Ngetrill sebagai inovasi platform penjangkauan aspirasi publik.

Juga adanya komitmen kepala daerah yang tinggi dan adanya hubungan baik serta pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam setiap perencanaan pembangunan dalam menjalankan praktik pemerintahan terbuka. Untuk, Banda Aceh memiliki Sistem Informasi Berbasis Masyarakat (SIBM), Suwarga dan Musrena (Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) sebagai bentuk wadah aspirasi publik.

Bojonegoro Match

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengepalkan tangan dan kemudian memekikkan kalimat, Bojonegoro Match, Bojonegoro Match. Kalimat itu

kemudian diikuti dan disambut gemuruh tepuk tangan ratusan warga diacara Peresmian Jembatan Padangan-Kasiman, Bojonegoro pada Rabu 16 Mei 2016. Pekikan dengan kalimat yang sama juga pernah diucapkan Hatta Radjasa.”Bojonegoro Match”, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, ketika itu, saat meresmikan Bendung Gerak di Bojonegoro, Rabu 2 Mei 2012.

Lalu apa sebenarnya arti dari Match itu? Jika dirunut dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), tidak ada arti kata dari Match. Justru arti kata Match bisa didapat dari Bahasa Jawa, bahasa yang sehari-hari digunakan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Arti match, bisa dimaknakan sebagai sesuatu yaitu baik, bagus dan hebat. Makna Match juga bisa menggambarkan warga di Bumi Angling Darmo, yaitu berpuas kesenangan atau kepuasan seseorang dalam sebuah kegiatan.



Yang menarik, sebutan Matoh juga kerap dihubungkan dengan masyarakat Samin. Masyarakat Samin adalah sebuah faham yang didirikan oleh Samin Surosentiko, yang gambaran sebagai perilaku kebersamaan, kesederhanaan, dan kejujuran serta apa adanya. Gambaran seperti itu masih bisa ditemui di komunitas warga Samin ada di Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo Bojonegoro. Menurut Hardjo Kardi, 82 tahun, penerus faham Samin di Bojonegoro, matoh itu cermin orang blokosuto (apa adanya).”Jadi, artinya baik, hebat dan tak dibuat-buat.” (wawancara kanalbojonegoro.com dengan Hardjo Kardi di Dusun Jepang).

Kini, kalimat Matoh, jadi kerap muncul dan kian populer. Dalam keseharian, kelompok-kelompok kegiatan, hingga kegiatan di Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro, kalimat matoh kerap disebut. Jika Bupati Bojonegoro Suyoto tampil pidato di sebuah acara, kalimat matoh sangat sering diucapkan. Matoh, dengan acungan jempol, sudah dipersepsikan masyarakat Bojonegoro sebagai symbol orang hebat dan luar biasa.

Menurut Kang Yoto, sesuai artinya Matoh itu bermakna hebat dan baik. Bahasa Matoh juga dijadikan semacam jargon untuk model rancang bangun proses transformasi kepemimpinan Bojonegoro ke depannya. Yang dimaksud dalam hal ini, proses panjang menuju ke arah kehidupan lebih baik dan berkesinambungan. Makanya, untuk mewujudkan itu, dibutuhkan pemimpin hebat dimana antara satu sama lainnya bisa menularkan kebaikan. Misalnya bagaimana pemimpin itu bisa membangun akan kesadaran, peneguhan serta niat yang menumbuhkan antara satu dan lainnya bisa satu tujuan.

Untuk memunculkan calon-calon pemimpin, Bojonegoro kini juga tengah menyiapkan pelbagai alternatif. Terobosannya yaitu Dinas Pendidikan membuat program bernama Generasi Emas dan telah ditetapkan Pemerintahan Bojonegoro tahun 2015 lalu. Salah satunya generasi emas dari atlet panahan Ika Yuliana Rochmawati, yang baru saja berlaga di Olimpiade Rio De Janeiro Brazil 2016 lalu. Persatuan Panahan Indonesia Cabang Bojonegoro, kini terus bergiat melakukan kaderisasi untuk memunculkan atlet muda berbakat dan prestasi.

Pemerintah Bojonegoro dan dukungan dari perusahaan migas, juga telah memberikan beasiswa gratis bagi siswa-siswi berbakat untuk belajar di perguruan tinggi. Tahun 2016 ini misalnya disediakan dana bagi 435 mahasiswa sebesar Rp 870 juta untuk beasiswa jalur umum khusus tingkat akhir. Tiap mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa sebesar Rp 2 juta.

Selain itu, Pemerintah Bojonegoro juga memberikan bantuan Rp 2 juta per siswa seluruh Bojonegoro—terutama untuk anak-anak sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Tujuan program ini, yaitu menekan angka putus sekolah di Bojonegoro, khususnya bagi siswa/siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan sederajat. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bojonegoro menyebutkan, tahun 2015 lalu, ada 49.340 siswa/siswi di Kabupaten ini, semuanya telah menerima Rp 2 juta persiswa. Sumbernya dari Dana Alokasi Khusus yang disisihkan dari Dana Bagi Hasil Migas.

Dipilihnya sektor pendidikan untuk proses transformasi kepemimpinan juga mendapat dukungan pelbagai pihak. Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, Bupati Suyoto, memiliki pemikiran yang jernih



dan profesional. Misalnya, terkait dengan pengelolaan migas, dianggap punya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang patut diteladani adalah, Suyoto sebagai bupati sederhana, sungguh-sungguh dan cerdas. “Pikirannya jernih,” ujarnya dikutip Bojonegoro Kemadjan,3 Mei 2016.

Kini, Bojonegoro telah melenggang jauh. Beberapa prestasi telah diraih dan tentu banyak predikat disandang. Menurut Bupati Suyoto, juga yang terpenting, bahwa proses regenerasi harus terus bergerak. Transformasi pemimpin layak harus disiapkan. Pemimpin Match dan pemimpin yang mengayomi rakyatnya.



D. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs ala Bojonegoro

Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum bicara tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka sebelumnya harus bicara tentang Pembangunan Berkelanjutan terlebih dahulu. Istilah ini muncul tahun 1987 oleh Jeffrey Sachs Direktur Sustainable Development Solution Network, sebuah lembaga think tank PBB tentang Program Pembangunan atau mitra kerja dari UNDP.

Definisi pembangunan berkelanjutan adalah : proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Apa artinya ini bahwa semua program pembangunan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan harus berorientasi ke masa depan dan harus bersifat inklusif (tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi semata tetapi harus juga melibatkan pembangunan manusia, lingkungan, ekosistem, sosial dll). Hal ini Coba diterjemahkan dalam suatu program pembangunan yang diistilahkan sebagai Millenium Development Goals (MDGs) yang diawali tahun 2000 (2000-2015) , dengan tujuan :

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

- Pendapatan populasi dunia sehari \$10000.
- Menurunkan angka kemiskinan.

Mencapai pendidikan dasar untuk semua

- Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.



Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Target 2005 dan 2015: Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Menurunkan angka kematian anak

Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Meningkatkan kesehatan ibu

- Target untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya

Target untuk 2015 adalah menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

Memastikan kelestarian lingkungan hidup

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.

- Pada 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat.
- Pada 2020 mendatang diharapkan dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional.

- Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
- Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
- Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.

- Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk kaum muda.
- Dalam kerja sama dengan pihak “pharmaceutical”, menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang
- Dalam kerja sama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Akan tetapi hingga berakhirnya program PBB ini ditahun 2015, banyak yang meragukan keberhasilannya hal ini karena :

1. Inisiatif lebih banyak dari pemerintah (top down)
2. Banyak target yang terlalu tinggi sulit dicapai
3. Bersifat parsial, tidak holistik
4. Khusus Indonesia baru diratifikasi pada periode kedua kepemimpinan Presiden SBY

Sehingga disimpulkan bahwa program ini gagal diakhir tahun 2015

Bagaimana dengan Bojonegoro ?

Pada era ini , terutama era Kang Yoto (mulai 2008), pembangunan Bojonegoro diarahkan pada kondisi pemerintahan yang terbuka dan pembangunan inklusif, ini jelas tertuang pada RPJMD dan menjadi pedoman Bojonegoro dan ditambahkan lagi sebagai nilai plus Bojonegoro adalah Welas Asih dan Ramah HAM.

- Menjadikan keterbukaan sebagai platform pemerintahan mulai dialog langsung maupun lewat media dengan prinsip 4 D (direct (intensif pertemuan bupati/pejabat langsung dengan rakyat) dialogic (mencari : solusi dengan melibatkan semua komponen masyarakat) , distribute (distribusi



tanggung jawab yang jelas pada pejabat dan masyarakat) , digital (disamping dialog tradisional juga menggunakan teknologi informasi : SMS, WA, email dll))disini benar benar diterapkan transparansi, akuntabilitas, partnership dan inovasi/IT) , inilah esensi keterbukaan pemerintah dan juga inklusifitas pembangunan Sehingga tercipta good governance (pemerintahan yang jujur dan bebas korupsi)

- Semua pembangunan diarahkan pada inklusif yang menitikkan pada pembangunan SDM, seperti kebijakan konten lokal pada pengelolaan migas, dimana perusahaan migas dan CSR nya harus mengutamakan penggunaan SDM lokal, sumber daya lokal, menjaga lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar migas

- Kang Yoto menciptakan dan menetapkan sebagai landasan pembangunan yang ditetapkan juga di RPJMD adalah : 6 Pilar Pembangunan Berkelanjutan Bojonegoro yaitu : Ekonomi, Lingkungan, Modal Sosial, Fiskal berkelanjutan. Pemerintahan yang Bersih dan Kepemimpinan Transformasi. Jika kita lihat pilar ini bermakna sangat kental akan pembangunan berkelanjutan
- Kebijakan Belanja APBD pada pemerintahan Kang Yoto :
 1. Belanja Pembangunan ekonomi harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM
 2. Infrastruktur juga menunjang ekonomi dan melihat kondisi masa depan Bojonegoro
 3. Menyusun fiskal berkelanjutan dengan menyiapkan dana abadi yang bersumber dari migas demi pembangunan SDM Bojonegoro di masa kini dan masa depan (beasiswa dan vocational)
- Ditambah dengan nilai plus yang lain seperti kabupaten yang komitmen pada penegakan HAM, mendukung dan mempertahankan nilai lokal untuk menciptakan kabupaten welas asih dan menjadikan Bojonegoro sebagai daerah yang layak untuk kehidupan golongan rentan seperti anak,ibu dan lansia .
- Juga memberikan akses seluasnya bagi warga untuk berkarya dan berinovasi dalam bingkai ekonomi kreatif sehingga lahirnya usaha/kelompok ekonomi kreatif seperti para pengrajin, seniman, juga industry dan jasa
- Dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintah membuka akses yang luas untuk investasi usaha , termasuk daerah

kantong kemiskinan dengan membuat Upah Umum Pedesaan (UUP) Rp 1.005.000, sehingga mulai usaha sepatu dll tumbuh yang bisa meningkatkan kualitas hidup rakyat dilokasi tersebut. Bojonegoro juga memanfaatkan benar data BDT BPS 2015, untuk memperkuat dasta penanggulangan kemiskinan di Bojonegoro (agar yang menerima bantuan benar-benar keluarag miskin)

- Agar mengurangi kesenjangan dan bisa mempercepat pembangunan di pedesaan maka Kang Yoto juga menggagas Gerakan Desa Sehat dan Cerdas yang variabelnya (20) tidak beda jauh dengan TPB saat ini. Suatu kecerdasan tingkat tinggi, untuk mengawali hal yang tepat terkait TPB.
- Bojonegoro berusaha mengelola sampah dan limbah dengan sebaik-baiknya sehingga ada efek positif yang jelas untuk mengurangi dampak perubahan iklim, disamping penanaman sejuta pohon yang terus digalakkan. Untuk energy terbarukan telah ditanam pohon kemiri sunan yang buahnya bisa menghasilkan bio etanol, disamping pengolahan sampah yang bisa menghasilkan Solar.



- Untuk menjaga kesehatan penduduk, maka Bojonegoro mengalokasikan Jamkesda yang paling besar di Indonesia, sehingga penduduk miskin tidak usah khawatir akan pembiayaan
- Untuk pendidikan Bojonegoro menjamin inklusifitas dengan membebaskan kaum penyandang difable untuk bersekolah di sekolah umum dan menjamin keberlangsungan pendidikan SD hingga SMA dan jika ada yang hamil dilarang untuk memberhentikan tetapi harus tetap sekolah. Juga disediakan beasiswa untuk siswa SMA sebesar Rp 2 juta per orang per tahun dan beasiswa perguruan tinggi bagi penduduk miskin
- Pemkab Bojonegoro juga menjalin kerjasama seluasnya dengan perguruan tinggi seperti UI,IPB,ITB dll dalam segala program pembangunan Juga bermitra dengan NGO seperti NRGi dalam analisis dana abadi, Bojonegoro Institute terkait OGP, INFID terkait HAM dll. Juga kerjasama dengan pengusaha seperti pengolahan sarang burung dan air menjadi minuman sehat Real Food yang diekspor ke Amerika yang meningkatkan pertanian model lama menjadi industri , pembangunan perumahan ramah lingkungan dll

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals/SDGs)

Karena potensi kegagalan yang tinggi maka mulai tahun 2012 dikaji suatu pengganti yang lebih komprehensif,

holistik dan melibatkan semua pihak untuk merencanakan pengganti MDGS, maka lahirlah ide melembagakan program pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik melibatkan semua pihak (no one left behind), maka tahun 2015 September lahirlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Indonesia ikut menandatangani.

Karena dasar untuk mengimplementasi ini cukup kuat apalagi didukung baseline data, RAAPI Bank Dunia di Bojonegoro, maka Bojonegoro melihat peluang untuk mendeklarasikan TPB sebagai yang pertama di Indonesia pada tanggal 22 Maret 2016 (disaksikan perwakilan masyarakat, bank dunia, Infid dan duta SDGs/ibu Zumrotin) yang terdiri dari 17 Tujuan TPB yaitu :

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan dan kesejahteraan
4. Kualitas pendidikan
5. Kesetaraan Gender
6. Air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pertumbuhan ekonomi inklusif
9. Inovasi dan infrastruktur
10. Mengurangi ketimpangan Kota dan pemukiman berkelanjutan
11. Kota dan pemukiman berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Mencegah dampak perubahan iklim
14. Menjaga sumberdaya air/laut
15. Menjaga ekosistem darat
16. Perdamaian dan keadilan
17. Revitalisasi Kemitraan Global



dan untuk memperjelas implementasi dan mempermudah koordinasi maka Bojonegoro menggagas Gugus Tugas TPB yang disahkan Bupati Bojonegoro tanggal 1 April 2016 yang melibatkan 4 sekawan di masyarakat yaitu : Pemerintah, Masyarakat (kelompok masyarakat), Akademisi/Ilmuwan dan Pengusaha/Filantropi.

Kalau melihat 17 tujuan tersebut sebenarnya sebelum menjadi TPB, Bojonegoro sudah mempersiapkan dengan baik dengan segala kebijakan dan program pembangunan. Akan tetapi untuk memperkuat lagi, maka gugus tugas TPB juga me-review atau menyesuaikan RPJMD dalam sisa waktu ini dengan

merubah misi dan programnya sesuai dengan TPB .

Gugus tugas juga memberikan masukan dan kebijakan strategi untuk menjalankan TPB di Bojonegoro yaitu :

1. Regulasi dan Kolaborasi
2. Keterbukaan dan Komitmen
3. Baseline data yang valid dan inovasi

Terjemahannya :

1. Mustahil akan menjalankan TPB jika RPJMD tidak disempurnakan (menyempurnakan dan sekarang proses Perda di DPRD) . Kolaborasi 4 sekawan (melibatkan semua pihak dan diketahui semua pihak, membuat lomba menulis esai terkait TPB di kalangan siswa SMA dan duta SDGs dikalangan siswa SMA)

2. Jelas Bojonegoro sejak tahun 2008 melakukan pemerintah terbuka (OGP) dan mendeklarasikan TPB di Bojonegoro sebagai bentuk komitmen

3. Menyiapkan baseline data yang tepat didukung oleh World bank dan GDSC yang pengumpulan data dilakukan oleh ibu ibu dasawisma sebagai model revolusi data . Inovasi pembangunan berkelanjutan sudah kami laksanakan sejak 2008 dengan dasar dan langkah yang tepat





KYATAAN SIKAP/DEKLARASI
OPEN DOCUMENT CONTRACT

Kami Yang Bertanda Tangan di Bawah ini
Stakeholder dan Penyedia Barang/Jasa di Kabupaten Bopengen
Siap Melaksanakan
Open Document Contract sebagai Bentuk
Open Government Partnership of Kabupaten Bopengen

(The banner contains numerous handwritten signatures and names of stakeholders and service providers.)



Learning Journey

Spirit The Origin Of Java The Real Indonesia and The World Model Of Open Government Partnership

Bagi sebagian orang Bojonegoro, mungkin masih asing dengan slogan atau tagline di atas. Selain slogan dengan bahasa khas Bojonegoro “ Matoh “, pemilihan tagline tersebut tidak begitu saja muncul. Namun, selalu ada hal yang melatar belakangi pemilihan kata tersebut.

Seperti tagline “The Origin of Java The Real Indonesia” yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti “Jawa yang asli, Indonesia yang sesungguhnya”.

Jika ditinjau dari aspek brand dan marketing, pemilihan tagline merupakan hal yang amat penting. Dari pilihan-pilihan kata yang digunakan dapat meningkatkan citra dan brand sebuah instansi, termasuk sebuah daerah. Namun tidak hanya sekadar menjadi slogan, pemilihan kata tersebut telah menjadi spirit bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Open Government Partnership (OGP).

Bukan tanpa alasan, dalam rapat penajaman Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan OGP beberapa waktu yang lalu, Kepala Dinas Kominfo Kusnandaka Tjatur Prasetyo mengungkapkan, dalam perencanaan pelaksanaan Open Government Partnership berangkat dari berbagai permasalahan yang ada di Bojonegoro, bahkan Jawa dan Indonesia.

The Origin of Java bermakna bahwa persoalan-persoalan yang ada di Jawa ternyata juga ada di Bojonegoro. Dan permasalahan yang ada di Indonesia juga ada di Bojonegoro. Sehingga, masih menurut Kusnandaka, ditambahkan kata-kata *The Real Indonesia*.

“Dan pada tahun 2016, Bojonegoro menjadi pilot project yang mewakili Indonesia, sehingga apa yang dilakukan Bojonegoro terkait dengan Open Government Partnership adalah pencerminan dari apa yang dilakukan Indonesia,” tandasnya.

Ditambahkan oleh Bupati Bojonegoro Suyoto, dalam spirit “The Origin of Java The Real Indonesia” Bojonegoro ingin

LESSON to learn

1. **Faktor Sukses : Kolaborasi 4 Sekawan → Pemerintah pada semua tingkatan dan kelembagaan, masyarakat, akademisi (para ahli) dan pengusaha**
2. Tiga Fase untuk mencapai Pemerintahan yg Terbuka : Peningkatan, Keberlanjutan dan Optimalisasi
3. **The Power of We**
We Believe :

“Inovasi adalah hasilnya, reformasi adalah cara, layanan terbaik adalah roh yang membawa kehidupan yang lebih baik kepada orang lain dan planet ini . Dan percaya atau tidak KETERBATASAN adalah cambuk .. fleksibilitas adalah angin “

menjadi cerminan dari Indonesia dan dunia.

“Sejak pertama kita ingin menjadi bagian dari Indonesia, karena itu kita mencoba memparalelkan apa yang menjadi masalah dunia dan masalah Indonesia. Waktu itu kita mendefinisikan masalah dunia itu meliputi kemiskinan, isu lingkungan hidup, keterbelakangan, energi, kemudian kita mencoba mendefinisikan isu nasional juga seperti itu,” paparnya.

Menurut Suyoto, masalah yang dihadapi Bojonegoro juga sama. Hal itulah yang ingin diselesaikan dengan good governance yang ditempuh melalui jalur demokrasi.

“Seluruh design RPJMD Bojonegoro sebenarnya adalah lokal, bagaimana kita ingin memberi prototype. Ketika dilakukan, itu sekaligus menjadi model, solusi atas problem dunia. Inilah miniatur Indonesia dan miniature dunia,” tandas orang nomor satu di Bojonegoro tersebut.

Pelaksanaan rapat penajaman Rencana Aksi Daerah (RAD) Open Government Partnership di rumah dinas bupati yang dihadiri oleh Seknas Open Government Indonesia (OGI), Kepala Staf Kepresidenan UKP4, NGO, DPRD Bojonegoro, DPR RI dan seluruh SKPD di Bojonegoro. (***)



Pemerintah Terbuka, Rakyat Bahagia

Open Government Patnership (OGP) merupakan model pemerintahan yang diterapkan oleh Pemkab Bojonegoro saat ini. Bahkan, Bojonegoro adalah satu-satunya daerah yang mewakili Indonesia dalam ajang OGP internasional.

Bojonegoro bersanding dengan 14 kabupaten/kota lain dari berbagai negara, seperti Madrid (Spanyol), Paris (Prancis), Sao Paolo (Brasil), dan Seoul (Korea) untuk berkompetisi sebagai daerah dengan pemerintahan paling terbuka di dunia. Sebuah prestasi yang patut dibanggakan.

OGP bukan hanya mengajak publik untuk melek teknologi. Lebih dari itu, secara substansial dan terpenting, OGP bertujuan membuka sekat antara pemerintah dan rakyat. Semuanya dilakukan secara

transparan. Sampai-sampai semua anggaran yang digunakan pemerintah dapat diketahui oleh rakyat dengan mudah.

Festival OGP di Bojonegoro yang berlangsung di gedung Pemkab Bojonegoro (19/10) merupakan bagian penting dari pengawalan realisasi OGP, baik pada tingkat kabupaten maupun pemerintah desa.

Festival OGP dihadiri oleh sejumlah pejabat penting. Di antaranya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Asman Abnur, Deputi Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Rizky Ferianto, Dirut BNI, perwakilan bupati/wali kota se-Jawa Timur, dan pejabat penting lainnya.

Dalam diskusi panel OGP, Bupati Bojonegoro Suyoto menjelaskan kenapa harus melaksanakan OGP. Pertama, karena amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, sebagai bentuk pencegahan konflik kepentingan dan potensi korupsi. Serta, peningkatan kualitas kebijakan berikut output-nya, memastikan keterlibatan publik, dan mencegah penipuan. Salah satu bentuk dari penerapan OGP, Bojonegoro sudah menerapkan sistem LAPOR. Semua aduan masyarakat bisa dikirimkan melalui pesan pendek (SMS) ke bupati. Sehingga, semua penanganan bisa dilakukan dengan cepat. Hal tersebut juga bisa mencegah adanya penipuan.

Pemkab Bojonegoro sendiri sudah menerapkan sistem OGP sejak 2008 silam. Pada tahun itu Bojonegoro sudah mulai melakukan sistem pengaduan masyarakat melalui dialog publik, SMS, dan

anjang sana. Setelah itu, 2010 Bojonegoro juga sudah mengadakan pengaduan publik melalui radio, kotak aduan, dan media cetak.

Tahun ini Bojonegoro menggunakan pengaduan Siap-Lapor. "Sistem pemerintahan terbuka akan membuat setiap individu bisa menyampaikan pendapatnya dengan bebas. Tidak perlu harus mewakili komunitas tertentu," tandas Kang Yoto.

Selain itu, sebagai bukti keseriusan mendorong keterbukaan hingga tingkat pemerintah desa, serta manifestasi OGP ke tingkat basis, Pemkab Bojonegoro bekerja sama dengan para pihak. Penilaian model pemerintahan desa terbuka ini mengacu pada empat variabel penting. Pertama, variabel transparansi dengan bobot penilaian 40 persen. Instrumen penilaiannya meliputi jenis informasi yang dipublikasi pemerintah desa, media informasi yang digunakan pemerintah desa, lokasi penempatan media luar ruang, dan pemerintah desa memiliki sarana publikasi media luar ruang yang permanen.

Kedua, variabel akuntabilitas dengan bobot penilaian 20 persen, yang menekankan pada tiga instrument penilaian. Yakni, pemerintah desa memiliki perencanaan keuangan desa yang sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah desa melakukan pengukuran kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, dan adanya sosialisasi anti korupsi oleh pemdes.

Ketiga, variabel partisipasi, dengan skor 25 persen, instrumen penilaiannya meliputi pemerintah desa memiliki sarana publikasi hasil musrenbang desa, dan pemerintah desa memiliki peraturan yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Kemudian, pemerintah desa melibatkan multipihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, pemerintah desa memiliki forum partisipasi masyarakat yang representatif dan inklusif untuk menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah desa memiliki fokus pembangunan dan mengundang partisipasi masyarakat, dan warga desa dan stakeholders berkontribusi dalam pembangunan.

Sementara variabel keempat, inovasi dengan bobot penilaian 15 persen. Instrumen penilaiannya meliputi pemerintah desa memiliki forum bersama, pemerintah desa memiliki media informasi berbasis teknologi informasi, pemerintah desa memiliki pusat informasi dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi, dan pemerintah desa memiliki sarana umpan balik berbasis teknologi informasi.

Dengan berbagai terobosan tata kelola pemerintahan yang terbuka, di bawah kepemimpinan Kang Yoto, Men PAN-RB Asman Abnur menyatakan, Bojonegoro adalah salah satu role model pemerintahan yang bagus. Sehingga, layak ditiru oleh berbagai daerah lain.

Jika ada pemerintah daerah lain yang datang ke Bojonegoro, menurut dia, tidak perlu melakukan studi banding. Melainkan langsung meniru. "Bojonegoro layak ditiru daerah lain," jelasnya.

Setelah dua bulan menjadi menteri, Asman Abnur mengaku sudah berkeliling berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menemukan daerah mana yang cocok untuk dijadikan role model pemerintahan yang bagus. "Bojonegoro ini adalah salah satu daerah yang harus dicontoh oleh daerah lainnya," pujiannya. (*)

CO-CREATING, KEHARUSAN DALAM OPEN GOVERNMENT



Oleh: Kusnandaka Tjatur

Sejumlah 15 subnational yang terpilih sebagai pilot project Open Government Partnership dari 69 negara anggota Open Government Partnership (OGP) telah melakukan pertemuan di Washington DC tanggal 15-16 September 2016, Bojonegoro salah satunya. Para peserta OGP subnational Government Pioneers Meeting mempunyai kesamaan pandangan, keterbukaan pemerintahan adalah kebutuhan yang harus dilakukan untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan, menguatkan kepercayaan dengan mengembangkan kolaborasi antar pihak.

Selama dua hari para peserta berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan keterbukaan pemerintahan, kendala dan tantangan serta bagaimana strateginya.

Bupati Bojonegoro Kang Yoto menyampaikan cara Bojonegoro mendorong tumbuhnya kepercayaan dengan membuka akses kepada masyarakat yang secara langsung dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan melalui HP, dialog publik, Layanan Aspirasi Pengaduan on-line Rakyat (LAPOR) yang terintegrasikan dengan seluruh sarana akses pengaduan masyarakat. Seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat, dilakukan kajian tindak lanjut dan evaluasi yakni Manajemen Review setiap hari Jum'at.

Target SDGs, merupakan bagian capaian strategi pemerintahan terbuka yang dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro. Co-creation, tata kelola pemerintahan dari individual didorong menjadi institusional sehingga terwujud sebagai cultur, mengubah dari selfis ke servis serta dari ego ke eco.

Keterbukaan pemerintahan yang telah dikembangkan Kabupaten Bojonegoro telah memberikan hasil meningkatnya pertumbuhan ekonomi (19,87 dengan migas, 5,99 tanpa migas), peningkatan NTP, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pengalaman Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan keterbukaan pemerintahan menarik para subnational, salah satunya dari Kigoma Tanzania yang menyampaikan untuk melakukan kerjasama dengan Bojonegoro.

Diskusi produktif dalam sesi pembahasan dan saling sharing terkait dengan Rencana Aksi masing masing subnational yang akan diimplementasikan pada tahun 2017, merupakan bagian kolaborasi yang konstruktif. Untuk mengembangkan, meningkatkan, menguatkan, mengintegrasikan dan keberlanjutan pemerintahan terbuka, ada 5 komitmen yang akan dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro yaitu :

1. Revolusi data, penguatan data dari tingkat pemerintahan desa menuju one data Bojonegoro, single data yang realiable, realtime.
.....
2. Penguatan keterbukaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat,
.....
3. Penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah dan keberlanjutan keterbukaan dengan penetapan Peraturan Daerah.
.....
4. Peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, yakni teribatkannya stakeholder pada semua tahapan, pembahasan KAK Perencanaan, evaluasi dan monitoring serta publikasi APBD yang mengacu pada kaidah keterbukaan publik.
.....
5. Peningkatkan kulaitas pelayanan pada sektor layanan kesehatan, perizinan, pendidikan, sarana infrastruktur dan usaha kecil dan menengah.

Rencana aksi tersebut akan difinalisasikan akhir bulan September dan akan di celebrasikan pada Festival OGP bulan Oktober sebagai rangkaian kegiatan Hari Jadi Bojonegoro. Seluruh SKPD hingga tingkat desa mempublikasikan akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun 2016 serta pokok pokok perencanaan anggaran tahun 2017 serta dilakukan pemeringkatan indek keterbukaan terhadap seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa.

Disamping itu seluruh SKPD yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Rencana Aksi OGP merumuskan sub Rencana



Aksi di tiap SKPD dan strategi pencapaiannya. Rencana aksi pemerintah terbuka dari seluruh subnational pilot project OGP, akan di celebrasikan pada bulan Desember 2016 di Paris, sebagai bentuk komitmen yang harus dilakukan pada tahun 2017.

Implementasi Rencana Aksi akan dilakukan pendampingan dan evaluasi oleh OGP sehingga secara dini dapat diketahui secara dini berbagai kendala dan hambatan serta sejauhmana ketepatan dan komitmen dalam pelakannya. Perumusan rencana aksi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara kolaborasi dengan berbagai elemen 4 sekawan, yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha dan masyarakat/ NGO.

Pada bulan Maret 2018, OGP akan melakukan evaluasi

secara independen (Independen Report Mekanism/ IRM) hingga akhir Desember 2017. Bulan Maret 2018, OGP akan menyampaikan hasil IRM terhadap komitmen pelaksanaan open government.

Di sela-sela kegiatan meeting, dari VOA Suara Amerika, melakukan wawancara dengan Kang Yoto, terrkait pelaksanaan keterbukaan pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro. Setelah selesaia acara meeting OGP, Kang Yoto menghadiri undangan USAID.

Amanda Conklin (Program Operations Analyst) bersama Tim USAID menerima Kang Yoto dan menggali secara jauh bagaimana proses co-creating, collaboration dan sustainabel development di Kabupaten Bojonegoro. Tim USAID mengapresiasi dan akan menibdaklanjuti melakukan pendampingan guna memperkuat model pemerintahan terbuka.

Dari pelaksanaan OGP subnational government pioners meeting, memberikan pembelajaran bagi kita,

1. Bahwa tatakelola pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Bojonegoro sudah _on the track
2. Penguatan collaboration para pihak harus dikembangkan.
3. Untuk peningkatan dan keberlanjutannya, maka sinergitas dan masukan, ide konstruktif sangat diperlukan dengan penguatan berbagai akses informasi,
4. Perubahan pola pikir sebagai pelayanan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan dan komitmen terbuka, adalah budaya yang harus dikuatkan..

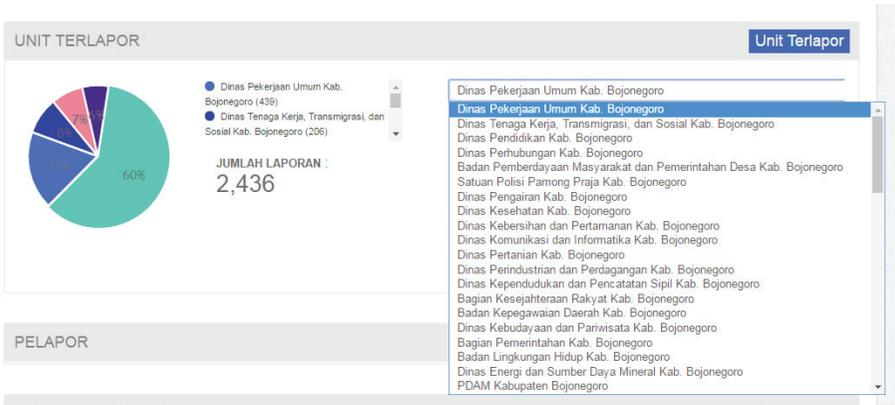
Dialog publik merupakan wadah yang paling efektif dan tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat, gagasan, kritik, saran, dan masukan kepada Pemkab Bojonegoro secara langsung.

Bagi Pemkab Bojonegoro dialog interaktif ini sangat penting. Inilah esensi dari demokrasi itu dan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik. Dialog interaktif ini adalah perwujudan nyata dari esensi demokrasi yakni dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dialog interaktif ini menjadi sarana bagi bupati, wakil bupati, dan kepala SKPD untuk memahami dan mengerti perasaan, pikiran, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dialog interaktif ini menjadi bahan dan pijakan bagi Bupati Bojonegoro untuk mengambil keputusan secara tepat.

Termasuk aplikasi layanan SIAP LAPOR! memudahkan bagi masyarakat Bojonegoro untuk menyampaikan segala unek-





uneknya terkait pelayanan publik. Mereka yang tinggal jauh dari Kota Bojonegoro seperti di Temayang, Sekar, Gondang, tidak perlu datang ke Pemkab Bojonegoro untuk mengadukan masalah yang ingin disampaikan. Mereka cukup mengirimkan pesan melalui aplikasi SIAP LAPOR! tersebut.

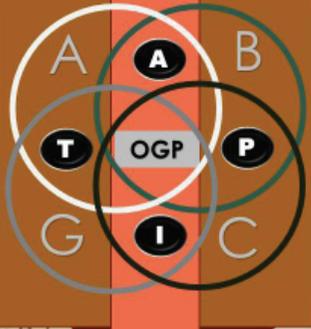
Aplikasi SIAP LAPOR! ini efektif untuk menjangkau masyarakat hingga di pelosok pedesaan. Hanya saja, mereka harus melek teknologi dan bisa memanfaatkan aplikasi SIAP LAPOR! tersebut. Aduan yang masuk di aplikasi ini juga bisa menjadi rujukan bagi Pemkab Bojonegoro untuk memahami persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dan sekaligus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Semua laporan dari masyarakat juga ditindaklanjuti oleh pemkab Bojonegoro dalam rapat rutin tiap Jumat pagi. Hasil rapat lalu ditindaklanjuti oleh masing-masing satker. Inilah yang disebut sebagai kerja yang sistematis, terukur, cepat, tepat dan bermanfaat.

LAMPIRAN

BOJONEGORO

Open Government Partnership
For Sustainable Development



Bojonegoro, subnational Open Government Partnership pioneer



KABUPATEN BOJONEGORO

- ❖ Luas wilayah : 235.000 Ha (40,15% wilayah → hutan Negara, 32,58% lahan sawah, 22,42% adalah tanah kering dan sisa nya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain) Terdiri dari 28 Kecamatan, 419 Desa 11 Kelurahan
- ❖ Jumlah penduduk :1.298.551 jiwa, 644.303 berkecimpung di sektor pertanian.
- ❖ Kaya Sumber daya alam (Hutan, pertanian dan Migas)
- ❖ Tantangan Kab. Bojonegoro :
 - Banjir dan kekeringan
 - Tanah Gerak → Infrastruktur dan Jalan rentan rusak
 - Memiliki sejarah panjang dalam kemiskinan (Endemic Poverty)
- ❖ Gambaran Birokrasi: 17 Dinas, 9 Badan, 2 Kantor, 28 Kecamatan, Setwan, Satpol PP, Inspektorat, 3 RSUD



TIDAK ADA KABUPATEN MISKIN
TETAPI YANG ADA , ADALAH
KABUPATEN SALAH URUS



Mengapa Harus Open Government Partnership?

1. Perintah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
2. Pencegahan konflik kepentingan dan potensi korupsi
3. Peningkatan kualitas kebijakan + Outputnya
4. Memastikan keterlibatan publik
5. Mencegah penipuan

Open
Government
Partnership

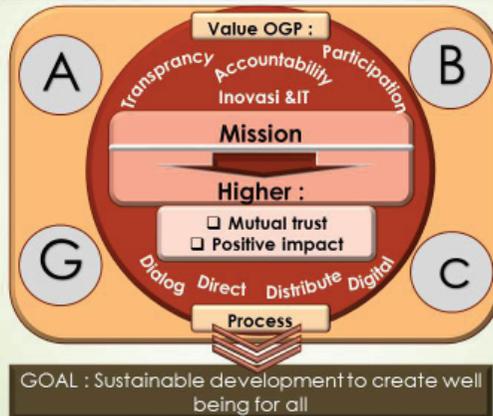


6. Memastikan Kolaborasi yang Efektif Dalam Rangka :

- Menemukan akar masalah dengan cepat
- Menentukan Solusi, Strategi hingga Teknis
- Peningkatan kemampuan belajar bersama

Bojonegoro Open Government Partnership

Global concern and local prototype by co-creation four element trough Open Government Partnership (OGP)



OUTCOME

**KEPIMPINAN TRANSFORMATIF DIDUKUNG OLEH
6 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DAN 7 ELEMEN TRANSFORMASI**



PEMERINTAHAN TERBUKA

Sistem Manajemen Kinerja

SIAP - LAPOR !

Manajemen Kinerja Bojonegoro 2016

Status Pelaporan 2016:

- 18 (1 target akan tidak tercapai dan target akan tidak tercapai)
- 19 (10 target akan tidak tercapai)
- 509 (100 target akan tercapai)
- 24 (24 target akan melebihi target)
- 0

KISAH SUKSES

Kandidi pabon sebelum dilaporikan

Kandidi pabon setelah dilaporikan

Ketik : BJK (spasi) Advan

www.lapor.ukp.go.id

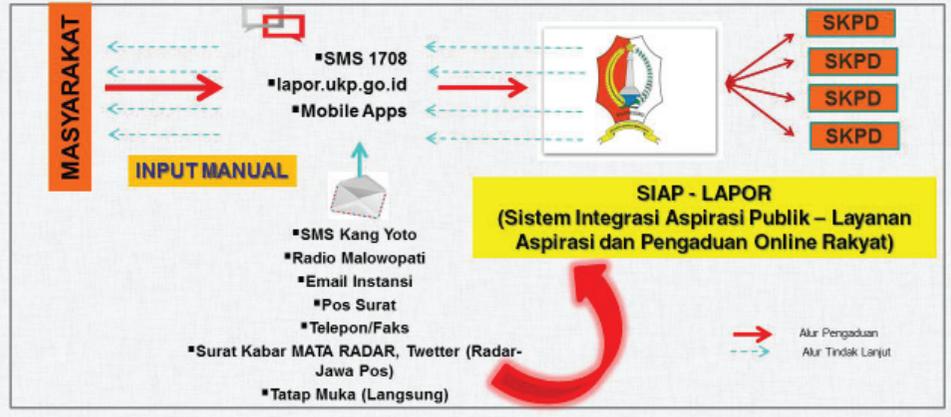
SMS 1706

Bulan	Belum	Proses	Selesai
Akhir Tahun 2015	323	4	155
Januari 2016	1540	27	1799
Februari 2016	1990	38	1996
Maret 2016	2533	22	2533
April 2016	2844	20	2844
Mei 2016	2965	20	2994
Juni 2016	3374	19	3393
Juli 2016	3434	20	3454
Agustus 2016	3538	14	3552

Terwujudnya Pemerintahan

- Terbuka
- Transparan
- Akuntabel
- Efektif dan Efisien

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan SIAP – LAPOR!



Dialogis
Saling Percaya,
Sinergi Positif → 4
sekawan (A,B,G,C):

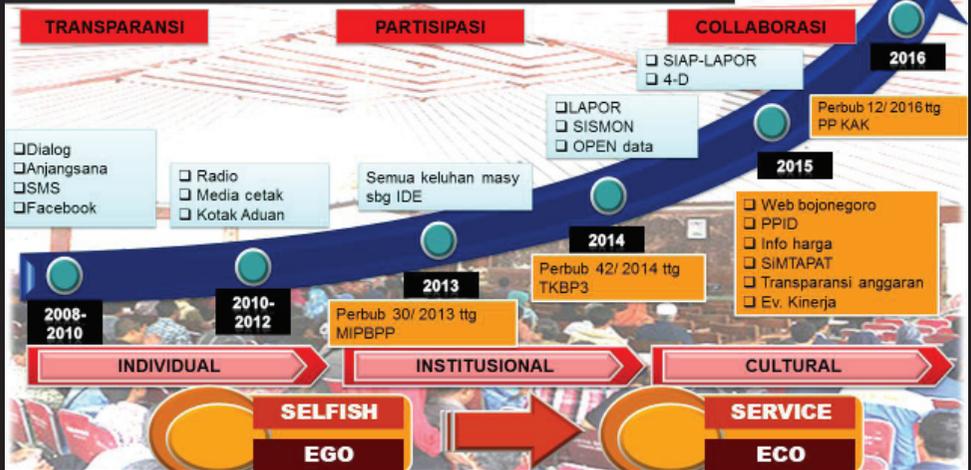
- Akademik
- Business
- Government
- Community

SISTEM KETERBUKAAN PEMERINTAHAN BOJONEGORO UU 14 Tahun 2008 ttg KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang
MANAJEMEN INOVASI PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI PUBLIK



PROSES PEMERINTAHAN TERBUKA KAB. BOJONEGORO



OPEN GOVERNMENT
KOLABORASI 4 SEKAWAN
(A, B, G, C)

Cara Bojonegoro mendengarkan dan Connec dengan Masyarakat?



Mendengarkan
prolem masy

Co-CREATING &
CONECTING

Mendengarkan
Memahi
Membahas
Memotivasi



Dialog Publik

Mengunjungi daerah
terisolir

Pelatihan & Motivasi, mentransform 6 mental negatif
(pelatihan mental Al Fatihah)



14



LEADERSHIP

Manajemen Review Berbasis IT
setiap hari Jum'at di Rumah Dinas Bupati





KOLABORASI Akademisi, Komunitas



NGO



Tim Penggerak PKK & RTK



Relawan TIK & Komunitas Blogger



Akademi Komunitas (AKN)



Nitizen



Kolaborasi Government, Bisnis



Kerjasama Pemkab. Bojonegoro dalam pengembangan TIK:

- Dewan TIK Kab. Bojonegoro
- UKP4/ KSP (Kantor Staf Presiden)
- Balai IPTEKnet – BPPT
- PT. Mediatrac Sistem Komunikasi
- PT. Telkom
- NGO (Sinergantara, Bojonegoro Institute, IDFOS)
- Relawan TIK dan Komunitas Blogger
- Jaringan Informasi Masyarakat (JIM)
- Akademi Komunitas dan SMKN



RENCANA AKSI
BOJONEGORO OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP

**NEXT
OGP**
BOJONEGORO

FESTIVAL
OPEN
GOVERNMENT
PARTNERSHIP
BOJONEGORO

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

AKSI	K/ L Penanggung jawab	Ukuran keberhasilan 2016	Ukuran keberhasilan 2017
40. Revolusi data	Dinas Kominfo (Kordinator), Bappeda, BPMPD, Camat, Kepala Desa/ Lurah, TP-PKK Kab.; NGO BI, Sinergantara, Mediatract	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terllatihnya Kader desa wisma TP PKK untuk inputing data (tiap desa/ kelurahan 2 orang) 2. Terlaksananya proses inputing pada aplikasi data desa wisma untuk seluruh desa/kelurahan (430 desa/ kelurahan) di Kabupaten Bojonegoro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terverifikasinya data hasil input Kader desa wisma TP PKK sebagai data dasar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; 2. Tersedianya dashboard visualisasi pada aplikasi data desa wisma; 3. Terinputkannya data desa wisma Bojonegoro pada portal data nasional data.go.id
41. Penguatan akuntabilitas pemerintahan desa	BPMPD (Kordinator), Dinas Kominfo, Bag. Pemerintahan, Camat, Kepala Desa, NGO BI, IDfOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpublikasikannya APBDes dan Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho 2. Tersusunnya Indeks Keterbukaan Pemerintahan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpublikasikannya APBDes, Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho (100%) , webdes (70%), terpublikasikannya asset desa melalui baliho (10 %) 2. Terlaksanakannya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pemerintahan Desa pada 30 desa; 3. Terlaksankannya pendampingan pembentukan desk Layanan Informasi Desa (PPID Desa) pada 30 Desa

AKSI	K/ L Penanggung jawab	Ukuran keberhasilan 2016	Ukuran keberhasilan 2017
42. Peningkatan transparansi sistem anggaran daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (Koordinator); Bappeda Dispenda, Dinas Kominfo NGO BI, IDFoS, PRC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpublikasikannya ringkasan APBD Kab. Bojonegoro melalui web BPKKD berbasis keterbukaan informasi publik 2. Terlaksananya Festival Open Government Partnership Kabupaten Bojonegoro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpublikasikannya perencanaan pembangunan dan anggaran daerah berbasis keterbukaan Informasi publik 2. Terpublikasikannya rincian APBD SKPD pada web PPIID SKPD berbasis keterbukaan informasi publik
43. Penguatan keterbukaan dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa	Bagian Pembangunan (Koordinator), Dinas PU, Dinas Kominfo BPKKD Bappeda NGO BI, IDFoS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya deklarasi Keterbukaan Informasi dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa 2. Terlaksananya penetapan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 3. Terbangunnya prototipe Aplikasi Open Data Kontrak 	1. Terimplementasikannya aplikasi dokumen kontrak pengadaan barang/ jasa

20

LAMPIRAN I

AKSI	K/ L Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan 2016	Ukuran Keberhasilan 2017
44. Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Bagian Ortala (Koordinator), Dinas Kesehatan, RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesomo, RSUD Padangan RSUD Sumberrejo Badan Perizinan Dinas Pendidikan Dinas PU, Kepala UPTD Puskesmas Kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK sasaran NGO IDFoS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya evaluasi Standart Pelayanan Publik (SPP) 2. Tersusunnya pedoman maklumat pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan pada 2 (dua) Puskesmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimplementasikannya pelayanan publik yang melibatkan partisipasi warga Masyarakat 2. Terlaksananya maklumat pelayanan publik di bidang kesehatan pada 2 (dua) Puskesmas

RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016

- 1. RENCANA AKSI** : **REVOLUSI DATA**
- a. Penanggung Jawab : Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. Instansi Terkait :
- SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Camat, Kepala Desa, Lurah.
- Lembaga Lain : Tim Penggerak PKK Kabupaten, NGO Bojonegoro Institute (BI), Sinergantar, Mediatract
- c. Kriteria Keberhasilan : Terlaksanakannya revolusi data Bojonegoro berbasis data Dasa Wisma TP PKK

No	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12	% Capaian	Kegiatan	Keterangan
1.	Terverifikasinya data hasil input Kader dasa wisma TP PKK sebagai data dasar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	<p>B03</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya inputing data 50% dan verifikasi 25% hasil input data dasa wisma TP PKK ➢ Terlaksanakannya sosialisasi mekanisme verifikasi data <p>B06</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya inputing data 100% dan verifikasi 50% hasil input data dasa wisma ➢ Terlaksanakannya inputing dan updating data di 10 desa menggunakan smartphone <p>B09</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya verifikasi hasil input data dasa wisma sebanyak 75% <p>B12</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya verifikasi hasil input data dasa wisma sebanyak 100% 		<ul style="list-style-type: none"> - TP PKK Kab. mengarahkan dasa wisma TP PKK melakukan pencatatan data pada excel - Dinas Kominfo bersama Tim menginputkan pada sistem - BPMPD, Pemerintah Desa, Kecamatan dan SKPD terkait Kabupaten, melakukan verifikasi data dasa wisma - Sinergantara dan Mediatract melakukan penguatan sistem aplikasi dan implementasinya 	

22

No	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12	% Capaian	Kegiatan	Keterangan
2.	Tersedianya dashboard visualisasi pada aplikasi data dasa wisma	<p>B03</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya Sosialisasi prototype dashboard aplikasi data dasa wisma pada 10 desa <p>B06</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya soft launching aplikasi dashboard data dasa wisma (versi BETA/pertama) pada 10 desa <p>B09</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya evaluasi dan penyempurnaan dashboard data dasa wisma <p>B12</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya evaluasi dan penyempurnaan dashboard data dasa wisma 		<ul style="list-style-type: none"> - Sinergantara melakukan sosialisasi prototype dashboard aplikasi data dasa wisma pada 10 desa, dan penyempurnaan 	
3.	Terinputkannya data dasa wisma Bojonegoro pada portal data nasional data.go.id	<p>B03</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya inventarisasi meta data, data dasa wisma Bojonegoro <p>B06</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya proses updating pada porta data.go.id (50%) <p>B09</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya proses updating portal data.go.id (75%) <p>B12</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terlaksanakannya proses updating portal data.go.id (100%) 		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo bersama Sinergantara dan Mediatract melakukan meta data, data dasa wisma - Dinas Kominfo melakukan updating data pada portal data nasional data.go.id 	

23

2. **RENCANA AKSI** : **PENGUATAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA**
 a. Penanggung Jawab : **Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)**
 b. Instansi Terkait :
 > SKPD : **Dinas Kominfo, Bappeda, Bagian Pemerintahan, Camat, Kepala Desa**
 > Lembaga Lain : **NGO Bojonegoro Institut (BI), NGO Institut Development for Society (IDFoS)**
 c. Kriteria Keberhasilan : **Terlaksanakannya pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan penguatan kapasitas masyarakat desa**

No	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12	% Capaian	Kegiatan	Keterangan
1.	Terpublikasikannya APBDes, laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui balho (100%), webdes (70%), terpublikasikannya asset desa melalui balho (10%)	B03 > Terlaksanakannya pelatihan operator sistem keuangan desa > Terlaksanakannya sosialisasi dan pendaftaran domain desa.id (70%) > Terlaksananya pembahasan instrumen pendataan dan perhitungan asset desa B06 > Terpublikasikannya pertanggung jawaban APBDes 2016 dan terpublikasikannya APBDes 2017 melalui balho 100% > Terlaksanakannya pendampingan aktivasi 70% webdes > Terumuskannya instrumen pendataan dan perhitungan asset desa > Terlaksanakannya pengelolaan keuangan desa melalui SIMDA Desa secara online di 56 desa B09 > Terpublikasikannya pertanggung jawaban APBDes 2016 dan terpublikasikannya APBDes 2017 melalui balho 100% dan media online 70% > Tersedianya data asset desa (10%) > Terlaksanakannya pendampingan, monitoring dan evaluasi SIMDA Desa B12 > Terlaksanakannya evaluasi transparansi desa melalui Festival Keterbukaan Pemerintahan Desa > Terpublikasikannya data asset desa melalui balho (10%) > Terlaksanakannya pengelolaan keuangan desa melalui SIMDA Desa secara online di 293 desa (70%)		- BPMPD melakukan pelatihan operator sistem keuangan desa - Dinas Kominfo melakukan sosialisasi dan pendaftaran domain desa.id - BPMPD, Bappeda, Bagian Pemerintahan, Camat, NGO melakukan monitoring publikasi APBDes tahun 2017 dan pertanggungjawaban APBDes 2016 serta pertanggungjawaban APBDes 2017 - BPMPD pendampingan dan monitoring implementasi SIMDA Desa - Dinas Kominfo bersama Tim dan NGO, melakukan evaluasi transparansi desa melalui Festival Keterbukaan Pemerintahan Desa	

24

No	Ukuran Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09, B12	% Capaian	Kegiatan	Keterangan
2.	Terlaksanakannya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi Pemerintahan Desa pada 30 desa	B03 > Terlaksanakannya persiapan pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemerintahan dan pembangunan desa di 30 desa B06 > Terlaksanakannya pelatihan penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemerintahan dan pembangunan desa di 30 desa B09 > Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi peserta penguatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemerintahan dan pembangunan desa di 30 desa B12 > Meningkatnya 90 % keterlibatan kader masyarakat yang terlatih dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemerintahan dan pembangunan desa di 30 desa		- BPMPD dengan NGO dan terkait melakukan pelatihan penguatan kapasitas masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pemerintahan dan pembangunan desa, di 30 desa	
3.	Terlaksanakannya pendampingan pembentukan desk layanan informasi desa (PPID Desa) pada 30 desa	B03 > Terlaksanakannya persiapan penguatan pendampingan, materi meliputi : regulasi desa, SOP dan pengadaan desk layanan PPID Desa > Terlaksanakannya sosialisasi dan pelaksanaan workshop PPID desa B06 > Terlaksanakannya pendampingan penguatan PPID pada 30 desa > Terlaksanakannya pendampingan pembentukan desk layanan informasi (PPID) desa pada 30 desa > Terumuskannya regulasi desa tentang layanan publik dan layanan informasi > Terpublikasikannya SOP standart layanan publik dan informasi desa melalui exbanner/poster > Tersedianya desk layanan informasi desa B09 > Terwujudnya PPID desa dan aktviasi kegiatan PPID desa meliputi : implementasi SOP layanan informasi desa, desk layanan informasi regulasi PPID desa, formulir-formulir layanan informasi B12 > Terlaksanakannya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID desa		- Dinas Kominfo bersama Tim dan NGO melakukan pendampingan pembentukan desk layanan informasi desa (PPID Desa) pada 30 desa	

25



SUKUN
Kendari

**Terapkan Sistem Terbuka
Pengadaan Barang-Jasa**

Tertarik Seni Rupa saat Antar Anakny ke Biringgana

lainnya Diberi Job oleh Temannya

Kontrak Terbuka Perkecil Pelanggaran

Salah satu upaya untuk menekan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan menerapkan sistem kontrak terbuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Kepala Dinas Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, kontrak terbuka adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang melibatkan masyarakat luas dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa.

Sistem ini diharapkan dapat mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi biaya. Dengan adanya kontrak terbuka, proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

LOGO BUMD

OGP

**FESTIVAL
BOJONEGORO
19 - 20 OKTOBER 2016**

**DEKORASI
PEMKAB**

**when you start open,
you never close again**

